



**PEMERINTAH  
KOTA SALATIGA**

# **LKJIP 2025**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
KOTA SALATIGA TAHUN 2025**



**PEMERINTAH  
KOTA SALATIGA**

# **LKJIP 2025**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**KOTA SALATIGA TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Salatiga Tahun 2025 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 untuk tahun yang ketiga. Secara Umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam kriteria sangat baik, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2025 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2025. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, 27 Maret 2026

WALI KOTA SALATIGA,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-2 periode RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang telah dicanangkan pada tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2025 disimpulkan bahwa **14** (empat belas) Indikator Kinerja Utama atau **48,3%** dikategorikan **Sangat Baik**, 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama atau **48,3%** dikategorikan **Baik** dan **1**(satu) Indikator Kinerja Utama atau **3,5%** dikategorikan **Cukup**.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                               | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja | Kategori    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1  | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas | Rata Rata Lama Sekolah                                                                                                | 11,46 Tahun | 11,49 Tahun    | 100,3           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                     | Harapan Lama Sekolah                                                                                                  | 15,46 Tahun | 15,47 Tahun    | 100.1           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                     | Indek Literasi Masyarakat                                                                                             | Nilai 63,14 | Nilai 63,14    | 100             | Baik        |
| 2  | Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah                                                                                     | Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan            | 44,98%      | 56,52%         | 125,7           | Sangat baik |
| 3  | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga                                                                                                           | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | 16 Medali   | 76 Medali      | 475             | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                     | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 23%         | 18,53 %        | 80,6            | Baik        |
| 4  | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk                                                                     | Angka Harapan Hidup                                                                                                   | 78,30 Tahun | 78,75 Tahun    | 101,1           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                     | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                             | 1,18%       | 1,13%          | 95,8            | Baik        |
| 5  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk                                                                                  | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                   | 5,40-6,10%  | 5,98%          | 110,8           | Sangat Baik |
|    |                                                                                                                                                     | Pendapatan per kapita                                                                                                 | 57,90 Juta  | 95,23          | 164,5           | Sangat Baik |
| 6  | Mewujudkan pengelolaan potensi                                                                                                                      | Pertumbuhan nilai investasi                                                                                           | 10,40%      | 76,91%         | 736,69          | Sangat baik |



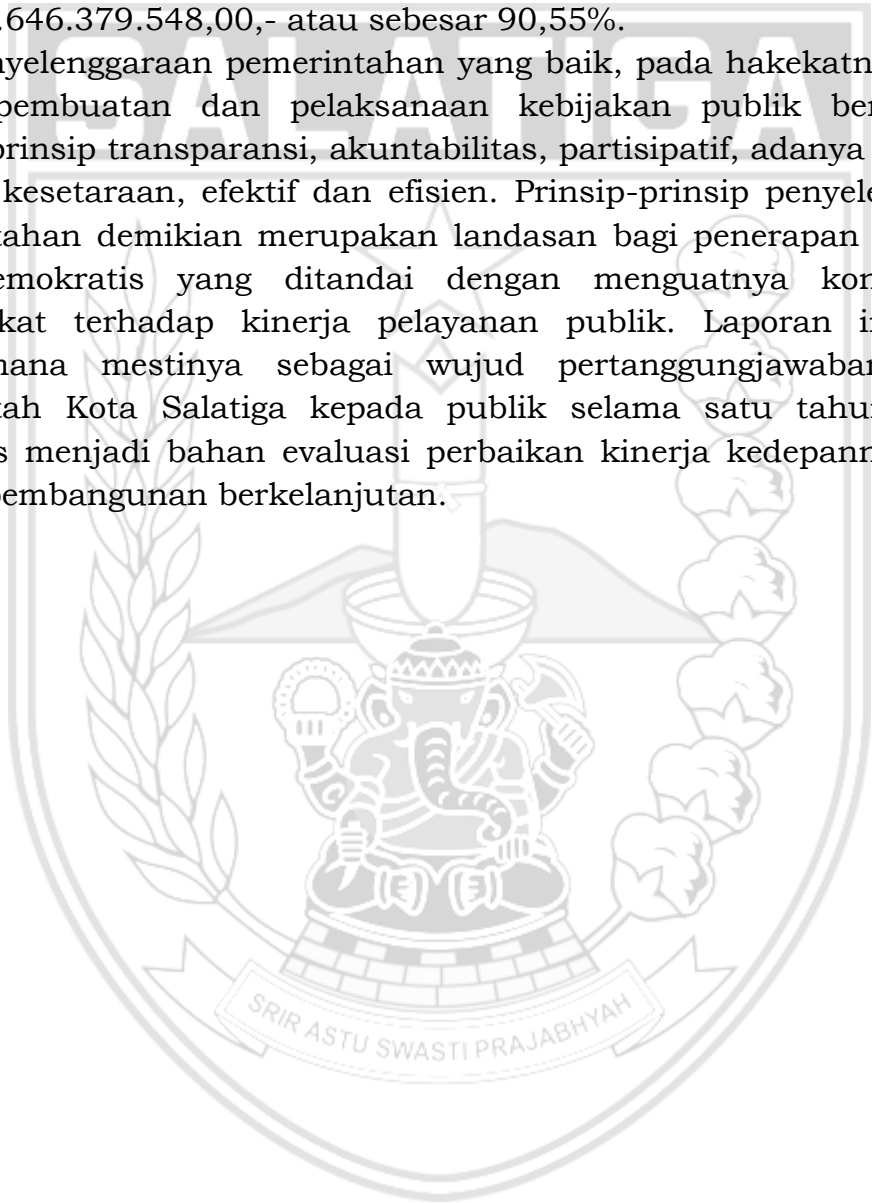
| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                   | Indikator Kinerja Utama                                    | Target 2025  | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja | Kategori    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
|    | daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga | Tingkat pengangguran terbuka                               | 2,54-3,67%   | 3,67%          | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Tingkat partisipasi angkatan kerja                         | 70,85-71,62% | 70,93%         | 100,1           | Sangat baik |
| 7  | Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial                         | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | 97,03%       | 97,89          | 100,9           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                            | Pola Pangan Harapan                                        | 96.60%       | 92,73          | 96,0            | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Persentase Peminat Transmigrasi                            | 4,07%        | 88,89%         | 2184            | Sangat baik |
| 8  | Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender                           | Score capaian KLA                                          | 625          | 682,21         | 109,2           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                            | IDG                                                        | 81,00        | 79,48          | 98,2            | Baik        |
|    |                                                                                                                            | IPG                                                        | 96           | 95,59          | 99,5            | Baik        |
| 9  | Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi                                 | 80,25        | Nilai 80,21    | 99,9            | Baik        |
| 10 | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan              | Cakupan Penanganan Ketentraman Kota                        | 100%         | 100%           | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Penanggulungan Potensi Konflik                             | 100%         | 87,5           | 87,5            | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana             | Nilai 0,58   | Nilai 0,52     | 89,7            | Baik        |
| 11 | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata                   | Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik     | 61,8%        | 61,8%          | 100             | Baik        |
| 12 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan                                           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Nilai 69,93  | Nilai 68,70    | 98,2            | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Rasio konektivitas kota                                    | 0,88%        | 0,88%          | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                            | Kinerja Lalu Lintas Kota                                   | 0,31%        | 0,23%          | 134,8%          | Sangat Baik |
| 13 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan                                   | Persentase rumah yang didukung oleh PSU                    | 13%          | 13,59%         | 104,5           | Sangat baik |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja Utama | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja | Kategori    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
|    | pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Pemukiman yang tertata  | 6,62%       | 6,87%          | 103,8           | Sangat baik |

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.134.849.392.788,00,- dengan realisasi sebesar Rp1.027.646.379.548,00,- atau sebesar 90,55%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Salatiga kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... ii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR GRAFIK ..... ix

DAFTAR TABEL..... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. LATAR BELAKANG ..... 1

    B. DASAR HUKUM ..... 1

    C. TUJUAN DAN MANFAAT..... 2

        1. Tujuan ..... 2

        2. Manfaat ..... 2

    D. GAMBARAN UMUM ..... 2

        1. Aspek Geografis ..... 2

        2. Aspek Demografis ..... 6

        3. Aspek Pemerintahan ..... 8

    E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ..... 12

    F. SISTEMATIKA..... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 14

    A. RENCANA STRATEGIS ..... 14

    B. ARAH KEBIJAKAN ..... 14

        1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 15

        2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 15

    C. PRIORITAS PEMBANGUNAN..... 16

    D. PERJANJIAN KINERJA ..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 23

    A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 ..... 23

        1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas ..... 25

            1.1 Rata-rata Lama Sekolah ..... 25

            1.2 Harapan Lama Sekolah ..... 26

            1.3 Indeks Literasi Masyarakat..... 26

        2. Sasaran Strategis II: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah..... 31

            2.1 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan ..... 31



3. Sasaran Strategis III : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga ..... 35

3.1 Peningkatan Prestasi Olahraga ..... 35

3.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan ..... 36

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 39

4.1 Angka Harapan Hidup ..... 40

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk..... 40

5. Sasaran Strategis V: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk..... 44

5.1 Pertumbuhan Ekonomi..... 45

5.2 Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) ..... 45

6. Sasaran Strategis VI: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga..... 53

6.1 Pertumbuhan Nilai Investasi..... 54

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... 54

6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... 55

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial..... 59

7.1 Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS ..... 59

7.2 Pola Pangan Harapan ..... 59

7.3 Persentase Peminat Transmigrasi ..... 60

8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesenjangan dan Keadilan Gender ..... 64

8.1 Score Capaian Kota Layak Anak (KLA) ..... 64

8.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ..... 65

8.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) ..... 65

9. Sasaran Strategis IX: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ..... 70

9.1 Indeks Reformasi Birokrasi..... 71

10. Sasaran Strategis X: Menciptakan Tatahidup Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan..... 78

10.1 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota ..... 78

10.2 Penanggulangan Potensi Konflik ..... 78

10.3 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana ..... 79



|                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11. Sasaran Strategis XI: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata .....                                                                           | 83  |
| 11.1 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik .....                                                                                                                                                  | 84  |
| 12. Sasaran Strategis XII: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan .....                                                                                                  | 88  |
| 12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....                                                                                                                                                                         | 88  |
| 12.2 Rasio Konektivitas Kota .....                                                                                                                                                                                 | 88  |
| 12.3 Kinerja Lalu Lintas Kota .....                                                                                                                                                                                | 89  |
| 13. Sasaran Strategis XIII: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup..... | 93  |
| 13.1 Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU .....                                                                                                                                                                 | 94  |
| 13.2 Pemukiman Yang Tertata.....                                                                                                                                                                                   | 94  |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                                                                                                                                                                                        | 99  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                                               | 102 |

**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Capaian IKU dan IKD Tahun 2025
3. Cascading 2025



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Salatiga..... 3

Gambar 1.2 Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah ..... 4





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2025..... 27

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2023-2025..... 28

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2025..... 28

Grafik 3.4 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025..... 32

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2023-2025..... 33

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025 ..... 33

Grafik 3.7 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2025..... 37

Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2025..... 37

Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ..... 38

Grafik 3.10 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025..... 41

Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023-2025.. 41

Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 .....                                                                                                                                                                                                            | 42 |
| Grafik 3.13 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk Tahun 2025 .....                                                                                                                         | 47 |
| Grafik 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk Tahun 2023-2025 .....                                                                                                                      | 47 |
| Grafik 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk Tahun 2025 .....                                                                                                         | 48 |
| Grafik 3.16 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2025 .....                 | 56 |
| Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2023-2025 .....              | 56 |
| Grafik 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2025 ..... | 57 |
| Grafik 3.19 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 .....                                                                                         | 61 |
| Grafik 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023-2025 .....                                                                                      | 62 |
| Grafik 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 .....                                                                         | 62 |
| Grafik 3.22 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2025 .....                                                                                           | 67 |
| Grafik 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-                                                                                                                                                                     |    |



|                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2023-2025 .....                                                                                                                                         | 67 |
| Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2025 .....          | 68 |
| Grafik 3.25 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025.....                                                             | 72 |
| Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025.....                                                          | 73 |
| Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 .....                                            | 73 |
| Grafik 3.28 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Tahun 2025.....                | 80 |
| Grafik 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Tahun 2023-2025.....             | 81 |
| Grafik 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Tahun 2025.... | 81 |
| Grafik 3.31 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2025.....                   | 85 |
| Grafik 3.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2023-2025 .....               | 85 |
| Grafik 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2025.....   | 86 |
| Grafik 3.34 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025.....                                           | 90 |
| Grafik 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2025 .....                                       | 91 |



Grafik 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025..... 91

Grafik 3.37 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2025 ..... 96

Grafik 3.38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2023-2025..... 96

Grafik 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2025..... 97





DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW .....                                                                                                                                                                  | 4  |
| Tabel 1.2  | Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin .....                                                                                                                                                                 | 7  |
| Tabel 1.3  | Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 .....                                                                                                                            | 7  |
| Tabel 1.4  | Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....                                                                                                                                                 | 10 |
| Tabel 1.5  | Komposisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 .....                                                                                                                                                                   | 11 |
| Tabel 2.1  | Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2025.....                                                                                                                                                                   | 17 |
| Tabel 3.1  | Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis .....                                                                                                                                                  | 24 |
| Tabel 3.2  | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas ...    | 27 |
| Tabel 3.3  | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas ... | 30 |
| Tabel 3.4  | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi Dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah .....                                                                                      | 31 |
| Tabel 3.5  | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah .....                                                                                   | 34 |
| Tabel 3.6  | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.....                                                                                                             | 36 |
| Tabel 3.7  | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.....                                                                                                          | 38 |
| Tabel 3.8  | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....                                                                       | 40 |
| Tabel 3.9  | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....                                                                    | 43 |
| Tabel 3.10 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk .....                                                                                   | 46 |
| Tabel 3.11 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.....                                                                                 | 49 |
| Tabel 3.12 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar                                                     |    |



|            |                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga .....                                                                                                                                                                   | 55 |
| Tabel 3.13 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga ..... | 58 |
| Tabel 3.14 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial...                                                                               | 60 |
| Tabel 3.15 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial...                                                                            | 63 |
| Tabel 3.16 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesenjangan dan Keadilan Gender .....                                                                             | 66 |
| Tabel 3.17 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesenjangan dan Keadilan Gender ....                                                                           | 69 |
| Tabel 3.18 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....                                                                                                                 | 72 |
| Tabel 3.19 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....                                                                                                              | 74 |
| Tabel 3.20 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Menciptakan Tatahidupan Masyarakat yang Tenang, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan .....                                                                        | 79 |
| Tabel 3.21 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Menciptakan Tatahidupan Masyarakat yang Tenang, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan .....                                                                     | 82 |
| Tabel 3.22 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata ..                                                                         | 84 |
| Tabel 3.23 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata .....                                                                   | 87 |
| Tabel 3.24 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.....                                                                                               | 89 |
| Tabel 3.25 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.....                                                                                            | 92 |



Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup ..... 95

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup ..... 98

Tabel 3.28 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2013- 2025 .....100

Tabel 4.1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 .....102





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, demokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat;
- b. Sebagai informasi kepada publik atas kinerja Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan saran/masukan dalam perbaikan kinerja.

#### **2. Manfaat**

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025;
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota salatiga di masa yang akan datang.

### **D. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Aspek Geografis**

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk.

Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki gunung Merbabu dan dikelilingi gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung-gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga menjadi subur dan memiliki potensi alam yang cukup besar.

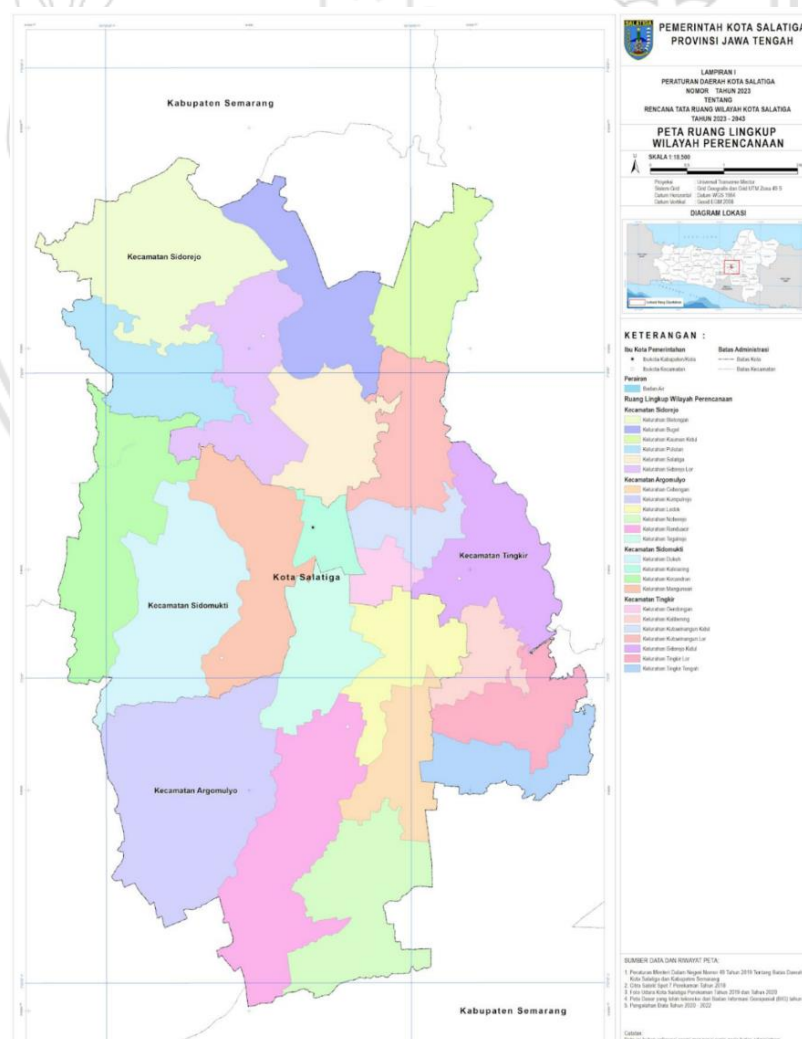
Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%).

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
- Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
  - Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
  - Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
  - Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
  - Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
  - Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sragen, Desa Gedongan
  - Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Adapun Peta Kota Salatiga disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Peta Kota Salatiga**



*Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga*

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang-Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah. Letak Kota Salatiga dalam konstalasi Jawa Tengah disajikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut:



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2025 tercatat sebesar 5678 Ha, terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 1.164 Rukun Tetangga (RT) dan 214 Rukun Warga (RW). Adapun rincian luas wilayah kecamatan dan kelurahan serta jumlah RT maupun RW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW**

| No | Kecamatan/Kelurahan       | Jumlah RT  | Jumlah RW |
|----|---------------------------|------------|-----------|
| 1. | <b>KECAMATAN SIDOREJO</b> | <b>329</b> | <b>65</b> |
|    | 1. Blotongan              | 74         | 15        |
|    | 2. Sidorejo Lor           | 101        | 18        |
|    | 3. Salatiga               | 83         | 12        |
|    | 4. Bugel                  | 23         | 7         |
|    | 5. Kauman Kidul           | 28         | 8         |
|    | 6. pulutan                | 20         | 5         |



| No            | Kecamatan/Kelurahan        | Jumlah RT   | Jumlah RW  |
|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| 2.            | <b>KECAMATAN TINGKIR</b>   | <b>308</b>  | <b>50</b>  |
|               | 1. Kutowinangun Kidul      | 70          | 8          |
|               | 2. Gendongan               | 38          | 5          |
|               | 3. Sidorejo Kidul          | 41          | 9          |
|               | 4. Kalibening              | 9           | 3          |
|               | 5. Tingkir Lor             | 25          | 8          |
|               | 6. Tingkir Tengah          | 34          | 11         |
|               | 7. Kutowinangun Lor        | 91          | 6          |
| 3.            | <b>KECAMATAN SIDOMUKTI</b> | <b>237</b>  | <b>40</b>  |
|               | 1. Kecandran               | 27          | 7          |
|               | 2. Dukuh                   | 75          | 10         |
|               | 3. Mangunsari              | 96          | 16         |
|               | 4. Kalicacing              | 39          | 7          |
| 4.            | <b>KECAMATAN ARGOMULYO</b> | <b>290</b>  | <b>59</b>  |
|               | 1. Noborejo                | 38          | 10         |
|               | 2. Ledok                   | 74          | 14         |
|               | 3. Tegalrejo               | 65          | 9          |
|               | 4. Kumpulrejo              | 44          | 10         |
|               | 5. Randuacir               | 44          | 10         |
|               | 6. Cebongan                | 25          | 6          |
| <b>JUMLAH</b> |                            | <b>1164</b> | <b>214</b> |

Sumber : Data Statistik Sektoral 2023

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 135.2/0012576 tentang penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tanggal 18 September 2020, dengan telah ditetapkannya segmen batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang maka Luas wilayah administrasi Kota Salatiga terjadi perubahan dimana luas sebelumnya 5678 Ha menjadi seluas 5498 Ha.

Kota Salatiga merupakan bagian dari kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidorejo berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan beraa pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo.



- c. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidomukti berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota Argomulyo berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, *sport centre*, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo.
- e. Sub Pusat Pelayanan Kota Tingkir berfungsi kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagai berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan perdagangan dan jasa, meliputi:
  - 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Noborejo;
    - b) Kelurahan Ledok;
    - c) Kelurahan Tegalrejo;
    - d) Kelurahan Kumpulrejo; dan
    - e) Kelurahan Cebongan.
  - 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Kecandran; dan
    - b) Kelurahan Dukuh.
  - 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Blotongan;
    - b) Kelurahan Bugel;
    - c) Kelurahan Kauman Kidul; dan
    - d) Kelurahan Pulutan.
  - 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Gendongan;
    - b) Kelurahan Kalibening;
    - c) Kelurahan Tingkir Lor; dan
    - d) Kelurahan Tingkir Tengah.

## 2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2025 sebanyak 199.906 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 1.066 jiwa dibandingkan tahun 2024. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2025 adalah sebanyak 99.065 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.841 jiwa. Rasio jenis kelamin Kota Salatiga sebesar 99,5% atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2018-2025 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut ini.



Tabel 1.2  
Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |           |         | Rasio Jenis Kelamin |
|----|-------|------------------------|-----------|---------|---------------------|
|    |       | Laki-Laki              | Perempuan | Total   |                     |
| 1  | 2018  | 96.490                 | 98.121    | 194.611 | 98,34               |
| 2  | 2019  | 97.026                 | 98.537    | 195.563 | 98,46               |
| 3  | 2020  | 97.326                 | 98.756    | 196.082 | 98,55               |
| 4  | 2021  | 97.382                 | 99.058    | 196.440 | 98,31               |
| 5  | 2022  | 99.403                 | 100.817   | 200.220 | 98,60               |
| 6  | 2023  | 99.872                 | 101.497   | 201.369 | 98,39               |
| 7  | 2024  | 98.569                 | 100.271   | 198.840 | 98,74               |
| 8  | 2025  | 99.065                 | 100.841   | 199.906 | 99,50               |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2025 tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.899 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 45.740 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga pada tahun 2025 disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025

| No            | Kecamatan/Kelurahan             | L             | P              | Jumlah         |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.            | <b>KECAMATAN SIDOREJO</b>       | <b>27.135</b> | <b>27.763</b>  | <b>54.898</b>  |
|               | 1. Kelurahan Salatiga           | 7.037         | 7.263          | 14.300         |
|               | 2. Kelurahan Bugel              | 1.828         | 1.841          | 3.669          |
|               | 3. Kelurahan Sidorejo Lor       | 7.154         | 7.385          | 14.539         |
|               | 4. Kelurahan Blotongan          | 6.678         | 6.585          | 13.163         |
|               | 5. Kelurahan Pulutan            | 2.380         | 2.398          | 4.778          |
|               | 6. Kelurahan Kauman Kidul       | 2.158         | 2.291          | 4.449          |
| 2.            | <b>KECAMATAN TINGKIR</b>        | <b>23.353</b> | <b>24.021</b>  | <b>47.374</b>  |
|               | 1. Kelurahan Kalibening         | 1.237         | 1.190          | 2.427          |
|               | 2. Kelurahan Sidorejo Kidul     | 3.977         | 4.093          | 8.070          |
|               | 3. Kelurahan Kutowinangun Lor   | 6.474         | 6.654          | 13.128         |
|               | 4. Kelurahan Kutowinangun Kidul | 3.830         | 4.057          | 7.887          |
|               | 5. Kelurahan Gendongan          | 2.560         | 2.680          | 5.240          |
|               | 6. Kelurahan Tingkir Tengah     | 2.725         | 2.751          | 5.476          |
|               | 7. Kelurahan Tingkir Lor        | 2.550         | 2.596          | 5.146          |
| 3.            | <b>KECAMATAN ARGOMULYO</b>      | <b>25.925</b> | <b>25.969</b>  | <b>51.894</b>  |
|               | 1. Kelurahan Ledok              | 5.446         | 5.523          | 10.969         |
|               | 2. Kelurahan Cebongan           | 2.634         | 2.647          | 5.281          |
|               | 3. Kelurahan Tegalrejo          | 6.293         | 6.227          | 12.520         |
|               | 4. Kelurahan Randuacir          | 3.670         | 3.659          | 7.329          |
|               | 5. Kelurahan Kumpulrejo         | 4.388         | 4.375          | 8.763          |
|               | 6. Kelurahan Noborejo           | 3.494         | 3.538          | 7.032          |
| 4.            | <b>KECAMATAN SIDOMUKTI</b>      | <b>22.652</b> | <b>23.088</b>  | <b>45.740</b>  |
|               | 1. Kelurahan Mangunsari         | 8.663         | 8.762          | 17.425         |
|               | 2. Kelurahan Dukuh              | 7.234         | 7.494          | 14.728         |
|               | 3. Kelurahan Kecandran          | 3.861         | 3.758          | 7.619          |
|               | 4. Kelurahan Kalicacing         | 2.894         | 3.074          | 5.968          |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>99.065</b> | <b>100.841</b> | <b>199.906</b> |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga



### 3. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
- c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
  - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 2) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - 3) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;



- 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
  - 7) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
  - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
  - 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  - 13) Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - 14) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
  - 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - 17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
  - 18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
  - 19) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



- ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
- f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
- 1) Kecamatan Argomulyo Tipe A
  - 2) Kecamatan Sidorejo Tipe A;
  - 3) Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
  - 4) Kecamatan Sidomukti Tipe B.
- g. Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2025 jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 3414 Orang, yang terdiri dari 1380 laki-laki dan 2034 perempuan. Selengkapny jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS Kota Salatiga**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                                              | L   | P   | JUMLAH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 1  | Inspektorat Daerah                                                                            | 20  | 17  | 37     |
| 2  | Sekretariat Daerah                                                                            | 61  | 51  | 112    |
| 3  | Sekeretariat DPRD                                                                             | 15  | 12  | 27     |
| 4  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                        | 16  | 23  | 39     |
| 5  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                             | 16  | 14  | 30     |
| 6  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                                              | 29  | 27  | 56     |
| 7  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                         | 11  | 16  | 27     |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           | 7   | 5   | 12     |
| 9  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                                               | 9   | 13  | 22     |
| 10 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                 | 14  | 14  | 28     |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 11  | 16  | 27     |
| 12 | Dinas Kesehatan                                                                               | 72  | 292 | 364    |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | 25  | 16  | 41     |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                      | 15  | 7   | 22     |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        | 94  | 18  | 112    |
| 16 | Dinas Pangan dan Pertanian                                                                    | 23  | 31  | 54     |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | 32  | 12  | 44     |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12  | 21  | 33     |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        | 12  | 11  | 23     |
| 20 | Dinas Pendidikan                                                                              | 437 | 842 | 1279   |
| 21 | Dinas Perdagangan                                                                             | 38  | 17  | 55     |



| NO | PERANGKAT DAERAH                       | L           | P           | JUMLAH      |
|----|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 22 | Dinas Perhubungan                      | 27          | 14          | 41          |
| 23 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja   | 13          | 14          | 27          |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan       | 11          | 20          | 31          |
| 25 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 20          | 17          | 37          |
| 26 | Dinas Sosial                           | 12          | 20          | 32          |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja             | 41          | 5           | 46          |
| 28 | Kecamatan Tingkir                      | 10          | 8           | 18          |
| 29 | Kecamatan Sidorejo                     | 7           | 10          | 17          |
| 30 | Kecamatan Sidomukti                    | 10          | 8           | 18          |
| 31 | Kecamatan Argomulyo                    | 12          | 6           | 18          |
|    | <b>TOTAL</b>                           | <b>1380</b> | <b>2034</b> | <b>3414</b> |

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

Sedangkan komposisi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota tahun 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 1.5  
Komposisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                                              | ASN |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |                                                                                               | PNS | PPPK |
| 1  | Inspektorat Daerah                                                                            | 36  | 1    |
| 2  | Sekretariat Daerah                                                                            | 105 | 7    |
| 3  | Sekretariat DPRD                                                                              | 26  | 1    |
| 4  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                        | 37  | 2    |
| 5  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                             | 28  | 2    |
| 6  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                                              | 55  | 1    |
| 7  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                         | 25  | 2    |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           | 11  | 1    |
| 9  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                                               | 20  | 2    |
| 10 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                 | 27  | 1    |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 24  | 3    |
| 12 | Dinas Kesehatan                                                                               | 292 | 72   |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | 38  | 3    |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                      | 20  | 2    |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        | 108 | 4    |
| 16 | Dinas Pangan dan Pertanian                                                                    | 52  | 3    |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | 40  | 4    |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 32  | 1    |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        | 22  | 1    |
| 20 | Dinas Pendidikan                                                                              | 896 | 384  |



| NO | PERANGKAT DAERAH                      | ASN         |            |
|----|---------------------------------------|-------------|------------|
|    |                                       | PNS         | PPPK       |
| 21 | Dinas Perdagangan                     | 51          | 4          |
| 22 | Dinas Perhubungan                     | 40          | 1          |
| 23 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  | 26          | 1          |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan      | 28          | 3          |
| 25 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 35          | 2          |
| 26 | Dinas Sosial                          | 30          | 3          |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja            | 43          | 3          |
| 28 | Kecamatan Tingkir                     | 28          | 0          |
| 29 | Kecamatan Sidorejo                    | 17          | 2          |
| 30 | Kecamatan Sidomukti                   | 16          | 0          |
| 31 | Kecamatan Argomulyo                   | 17          | 3          |
| 32 | <b>TOTAL</b>                          | <b>2808</b> | <b>613</b> |

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat;
- 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- 3. Peningkatan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;
- 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat;

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LKjIP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kota Salatiga tahun 2023.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. Perjanjian Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam Rencana pembangunan Daerah. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota, selain itu RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : **“SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”** dimana prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kemampuan jalan dengan focus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat;
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan;
3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak;
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman;
5. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi;
6. Penataan Kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

### B. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 tujuan dan 29 sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa



dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja pembangunan daerah setiap tahunnya .

**Tahun 2025 : “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”**

Tema pembangunan tahun 2025 ini merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi daerah tahun 2025 memperhatikan juga kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 yang ditujukan oleh laju pertumbuhan PDBD atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11% sedangkan kontraksi tertinggi pada sector Pertambangan dan Penggalan yaitu sebesar-27,16%.

Arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta pengembangan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sector ekonomi kerakyatan dan industry kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Salatiga.

## 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;



- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan tata pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

### C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 **“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”**, yang bertujuan untuk memberikan tema, buansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang kemuadian akan diterjemahkan dalam rencana Kerja pembangunan daerah setia tahunnya. Prioritas pembangunan nasional dan Provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat;
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan;
3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak;
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industry dan kawasan permukiman;



- 5. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi;
- 6. Penataan Kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi ,asyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

D.PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut ini tabel Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2025.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                     | SATUAN | TARGET 2025 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas | Rata Rata Lama Sekolah                                                                                                | tahun  | 11,46       |
|    |                                                                                                                                                     | Harapan Lama Sekolah                                                                                                  | tahun  | 15,46       |
|    |                                                                                                                                                     | Indek Literasi Masyarakat                                                                                             | Nilai  | 63,14       |
| 2  | Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah                                                                                     | Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan            | %      | 44,98       |
| 3  | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga                                                                                                           | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | medali | 16          |
|    |                                                                                                                                                     | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | %      | 23          |
| 4  | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk                                                                     | Angka Harapan Hidup                                                                                                   | tahun  | 78,30       |
|    |                                                                                                                                                     | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                             | %      | 1,18        |
| 5  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk                                                                                  | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                   | %      | 5,40-6,10   |
|    |                                                                                                                                                     | Pendapatan per kapita                                                                                                 | juta   | 57,90       |



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                          | SATUAN | TARGET 2025 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 6  | Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga                    | Pertumbuhan nilai investasi                                | %      | 10,4        |
|    |                                                                                                                                                                              | Tingkat pengangguran terbuka                               | %      | 2,54-3,67   |
|    |                                                                                                                                                                              | Tingkat partisipasi angkatan kerja                         | %      | 70,85-71,62 |
| 7  | Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial                                                                           | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | %      | 97,03       |
|    |                                                                                                                                                                              | Pola Pangan Harapan                                        | %      | 96.60       |
|    |                                                                                                                                                                              | Persentase Peminat Transmigrasi                            | %      | 4,07        |
| 8  | Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender                                                                             | Score capaian KLA                                          | Nilai  | 625         |
|    |                                                                                                                                                                              | IDG                                                        | Nilai  | 81,00       |
|    |                                                                                                                                                                              | IPG                                                        | Nilai  | 96          |
| 9  | Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah                                                                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi                                 | Nilai  | 80,25       |
| 10 | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan                                                                | Cakupan Penanganan Ketentraman Kota                        | %      | 100         |
|    |                                                                                                                                                                              | Penanggulangan Potensi Konflik                             | %      | 100         |
|    |                                                                                                                                                                              | Indek Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana              | %      | 0,58        |
| 11 | Meningkatkan kualitas pentaan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata                                                                      | Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik     | %      | 61,8        |
| 12 | Meningkaykan kualitas lingkungan hidup dlam mendukung pembangunan berkelanjutan                                                                                              | Indek kualitas lingkungan Hidup                            | Nilai  | 69,93       |
|    |                                                                                                                                                                              | Rasio konektivitas kota                                    | %      | 0,88        |
|    |                                                                                                                                                                              | Kinerja lalu lintas kota                                   | %      | 0,31        |
| 13 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Persentase rumah yang didukung oleh PSU                    | %      | 13          |
|    |                                                                                                                                                                              | Pemukiman yang tertata                                     | %      | 6,62        |

| NO | PROGRAM                                                     | ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 490.091.605.823                    |
| 2  | Program Pengelolaan Pendidikan                              | 41.630.345.713                     |
| 3  | Program Pengembangan Kurikulum                              | 18.204.000                         |
| 4  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    | 18.009.477.499                     |



| NO | PROGRAM                                                                                        | ANGGARAN<br>PERUBAHAN<br>TAHUN 2025<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5  | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                                      | 15.454.900                                  |
| 6  | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                                                         | 319.385.500                                 |
| 7  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan<br>Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                 | 52.720.249.229                              |
| 8  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                                 | 389.355.000                                 |
| 9  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan<br>Makanan Minuman                                 | 230.601.000                                 |
| 10 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang<br>Kesehatan                                            | 3.486.752.000                               |
| 11 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                      | 5.212.678.000                               |
| 12 | Program Pengelolaan dan Pengembangan<br>Sistem Penyediaan Air Minum                            | 2.046.711.500                               |
| 13 | Program Pengelolaan dan Pengembangan<br>Sistem Air Limbah                                      | 5.725.974.000                               |
| 14 | Program Pengelolaan dan Pengembangan<br>Sistem Drainase                                        | 19.163.814.000                              |
| 15 | Program Penataan Bangunan Gedung                                                               | 617.370.000                                 |
| 16 | Program Penataan Bangunan dan<br>Lingkungannya                                                 | 11.396.250.000                              |
| 17 | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                  | 29.113.370.000                              |
| 18 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi                                                            | 112.409.173                                 |
| 19 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                         | 626.928.925                                 |
| 20 | Program Pengembangan Perumahan                                                                 | 889.372.540                                 |
| 21 | Program Kawasan Permukiman                                                                     | 17.715.295.000                              |
| 22 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan<br>Utilitas Umum (PSU)                               | 4.111.154.875                               |
| 23 | Program Peningkatan Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                         | 1.905.166.300                               |
| 24 | Program Penanggulangan Bencana                                                                 | 1.586.560.732                               |
| 25 | Program Pencegahan, Penaggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan<br>Non Kebakaran | 203.765.700                                 |
| 26 | Program Pemberdayaan Sosial                                                                    | 643.837.300                                 |
| 27 | Program Rehabilitasi Sosial                                                                    | 1.136.830.800                               |
| 28 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                        | 1.212.640.000                               |
| 29 | Program Penanganan Bencana                                                                     | 35.195.000                                  |
| 30 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                       | 123.207.300                                 |
| 31 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas<br>Tenaga Kerja                                      | 646.644.256                                 |
| 32 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                | 170.000.000                                 |
| 33 | Program Hubungan Industrial                                                                    | 586.293.948                                 |
| 34 | Program Pengarusutamaan Gender dan<br>Pemberdayaan Perempuan                                   | 170.111.800                                 |
| 35 | Program Perlindungan Perempuan                                                                 | 248.691.000                                 |
| 36 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                          | 518.138.000                                 |
| 37 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan<br>Anak                                             | 0                                           |
| 38 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                               | 228.452.500                                 |
| 39 | Program Perlindungan Khusus Anak                                                               | 339.199.000                                 |



| NO | PROGRAM                                                                                                                 | ANGGARAN<br>PERUBAHAN<br>TAHUN 2025<br>(Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 40 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan                                         | 1.111.158.800                               |
| 41 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                       | 535.003.400                                 |
| 42 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                     | 22.320.000                                  |
| 43 | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                      | 79.600.200                                  |
| 44 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                    | 716.768.600                                 |
| 45 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                             | 12.506.000                                  |
| 46 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                                                  | 185.829.200                                 |
| 47 | Program Penatagunaan Tanah                                                                                              | 1.775.074.425                               |
| 48 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 34.750.000                                  |
| 49 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 883.751.720                                 |
| 50 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | 3.932.809.882                               |
| 51 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 46.530.000                                  |
| 52 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 29.000.200                                  |
| 53 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | 142.908.800                                 |
| 54 | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | 4.036.815.225                               |
| 55 | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                            | 1.046.096.000                               |
| 56 | Program Pencatatan Sipil                                                                                                | 320.954.300                                 |
| 57 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                 | 42.374.000                                  |
| 58 | Program Pengendalian Penduduk                                                                                           | 556.672.000                                 |
| 59 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                               | 1.673.905.411                               |
| 60 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                            | 1.268.051.000                               |
| 61 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                           | 14.329.919.560                              |
| 62 | Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik                                                                     | 610.587.100                                 |
| 63 | Program Aplikasi Informatika                                                                                            | 4.584.976.004                               |
| 64 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                             | 188.814.457                                 |
| 65 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                            | 70.537.000                                  |
| 66 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                                            | 326.170.000                                 |
| 67 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                          | 198.551.999                                 |
| 68 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                                                | 2.132.304.732                               |
| 69 | Program Pengembangan UMKM                                                                                               | 444.051.000                                 |



| NO | PROGRAM                                                                                            | ANGGARAN<br>PERUBAHAN<br>TAHUN 2025<br>(Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 70 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | 200.870.000                                 |
| 71 | Program Promosi Penanaman Modal                                                                    | 104.728.000                                 |
| 72 | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                  | 62.700.000                                  |
| 73 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   | 118.156.174                                 |
| 74 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                               | 1.061.011.100                               |
| 75 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                             | 12.340.111.200                              |
| 76 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan                                              | 1.921.871.200                               |
| 77 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor                                                           | 156.408.600                                 |
| 78 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                                      | 128.022.000                                 |
| 79 | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                    | 1.391.080.000                               |
| 80 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                          | 54.500.000                                  |
| 81 | Program Pembinaan Sejarah                                                                          | 126.809.200                                 |
| 82 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                   | 48.320.000                                  |
| 83 | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                    | 109.906.000                                 |
| 84 | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                     | 2.215.044.715                               |
|    | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                                               | 145.761.100                                 |
| 85 | Program Pengelolaan Arsip                                                                          | 403.346.405                                 |
| 86 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                        | 11.362.000                                  |
| 87 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             | 106.890.500                                 |
| 88 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   | 150.374.000                                 |
| 89 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | 778.492.004                                 |
| 90 | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | 744.808.299                                 |
| 91 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 94.830.000                                  |
| 92 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | 38.611.650                                  |
| 93 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | 716.768.600                                 |
|    | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | 174.146.400                                 |
| 94 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                            | 593.137.000                                 |
| 95 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                          | 56.950.900                                  |
| 96 | Program Penyuluhan Pertanian                                                                       | 128.579.200                                 |
| 97 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                                                       | 6.316.000                                   |
| 98 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | 2.186.094.826                               |
| 99 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                | 17.165.800                                  |



| NO     | PROGRAM                                                                                                                                | ANGGARAN<br>PERUBAHAN<br>TAHUN 2025<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 100    | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                            | 82.796.500                                  |
| 101    | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                                                                                        | 25.385.000                                  |
| 102    | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                                                                           | 896.331.612                                 |
| 103    | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                                                               | 36.080.640                                  |
| 104    | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional                                                                               | 16.640.700                                  |
| 105    | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                               | 49.650.000                                  |
| 106    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                          | 1.664.441.300                               |
| 107    | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                   | 901.323.800                                 |
| 108    | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                                                                     | 20.345.792.650                              |
| 109    | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                      | 1.053.383.100                               |
| 110    | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | 2.018.246.900                               |
| 111    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                    | 3.510.053.800                               |
| 112    | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                | 2.394.738.055                               |
| 113    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                  | 3.366.821.095                               |
| 114    | Program Kepegawaian Daerah                                                                                                             | 945.961.280                                 |
| 115    | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                               | 2.813.141.853                               |
| 116    | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                                             | 235.338.500                                 |
| 117    | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                     | 229.096.900                                 |
| 118    | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                                                | 876.549.000                                 |
| 119    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                              | 413.500.200                                 |
| 120    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                     | 24.783.766.053                              |
| 121    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | 502.421.717                                 |
| 122    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                       | 170.300.000                                 |
| 123    | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 701.754.500                                 |
| 124    | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 812.309.016                                 |
| 125    | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | 1.479.442.000                               |
| 126    | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | 196.916.115                                 |
| 127    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | 794.970.600                                 |
| JUMLAH |                                                                                                                                        | 1.134.849.392.788                           |



BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Salatiga (PK Perubahan Kota Salatiga) Tahun 2025.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

**Persentase Capaian Indikator Kinerja**

=

**Realisasi**

**Rencana**

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

**Persentase Capaian Indikator Kinerja**

=

**Rencana - (Realisasi - Rencana)**

**Rencana**

X 100%

atau dengan menggunakan rumus:

Persentase Capaian  
Indikator Kinerja

=

( 2 x Rencana ) – Realisasi

Rencana

X 100%

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut ini.

Tabel 3.1  
Skala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| 1      | > 100%          | Sangat Baik      |
| 2      | 75% - 100%      | Baik             |
| 3      | 55% - 74%       | Cukup            |
| 4      | < 55%           | Kurang           |

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2023 dilakukan analisis dengan cara:

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7.

Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya digunakan rumus sebagai mana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E

:

Efisiensi
- PAKi

:

Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi

:

Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi

:

Capaian Keluaran i



Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Hasil analisa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis (IKU) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas**

Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Sasaran Strategis I adalah Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas dan Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Kreatif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD
  2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
  3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
  4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut adalah:

#### **➤ Dinas Pendidikan**

5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut adalah:

#### **➤ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah serta Indeks Literasi Masyarakat tidak terlepas dari tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Daerah pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat.

Perhitungan dan Pengolahan data untuk mengukur realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dilakukan oleh BPS, sedangkan Indeks Literasi Masyarakat melalui survey yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

#### **1.1 Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang diselesaikan dalam pendidikan formal.

Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:



$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$$

dengan:

$P_{15+}$  = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke- $i$  =

- a. Tidak pernah sekolah = 0
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

1.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

- HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
- Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- i = Usia (a, a + 1, ..., n)
- FK = Faktor koreksi pesantren

Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

1.3 Indeks Literasi Masyarakat

Indek literasi masyarakat diukur dari kemampuan:

- Membaca
- Bicara
- Menulis
- Memahami bacaan
- Eksplorasi pengetahuan
- Trnasformasi menjadi pengetahuan
- Transformasi menjadi produk/jasa

Capaian kinerja IKU pada Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis  
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan  
Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan  
Masyarakat yang Maju dan Cerdas

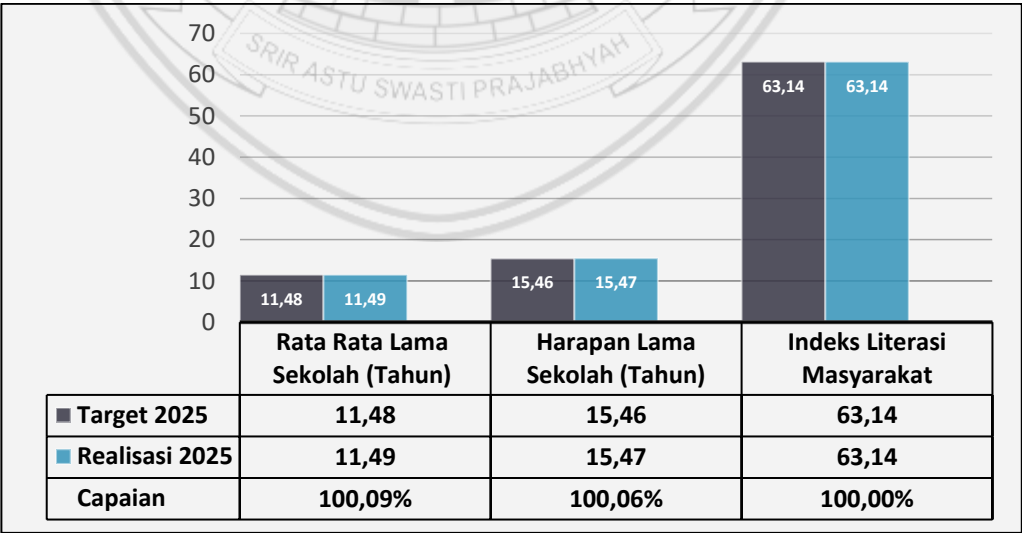
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                        |        |            |            |            |                       |
| Rata Rata Lama Sekolah        | Tahun  | 10,67      | 10,68      | 11,48      | 10,70                 |
| Harapan Lama Sekolah          | Tahun  | 15,43      | 15,44      | 15,46      | 15,46                 |
| Indeks Literasi Masyarakat    | Nilai  | 52,06      | 52,56      | 63,14      | 53,26                 |
| Realisasi                     |        |            |            |            |                       |
| Rata Rata Lama Sekolah        | Tahun  | 11,24      | 11,48      | 11,49      | -                     |
| Harapan Lama Sekolah          | Tahun  | 15,44      | 15,44      | 15,47      | -                     |
| Indeks Literasi Masyarakat    | Nilai  | 63,14      | 63,14      | 63,14      | -                     |
| Capaian Kinerja               |        |            |            |            |                       |
| Rata Rata Lama Sekolah        | %      | 105,34     | 107,49     | 100,3      | -                     |
| Harapan Lama Sekolah          | %      | 100,06     | 100        | 100,1      | -                     |
| Indeks Literasi Masyarakat    | %      | 121,28     | 120,13     | 100        | -                     |

Sumber : BPS

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target dan realisasi IKU pada Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

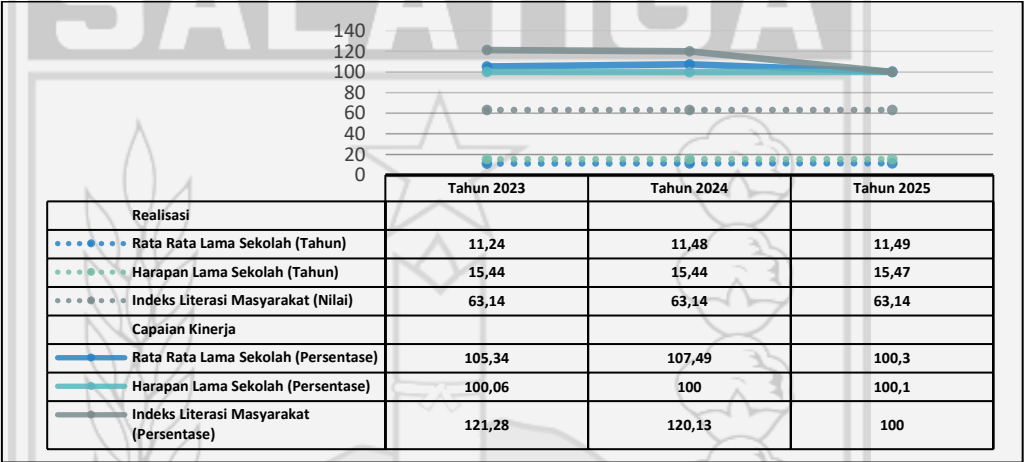
Grafik 3.1  
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan  
Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan  
Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas dari 3 IKU dapat terealisasi melebihi sesuai target yang telah ditentukan.

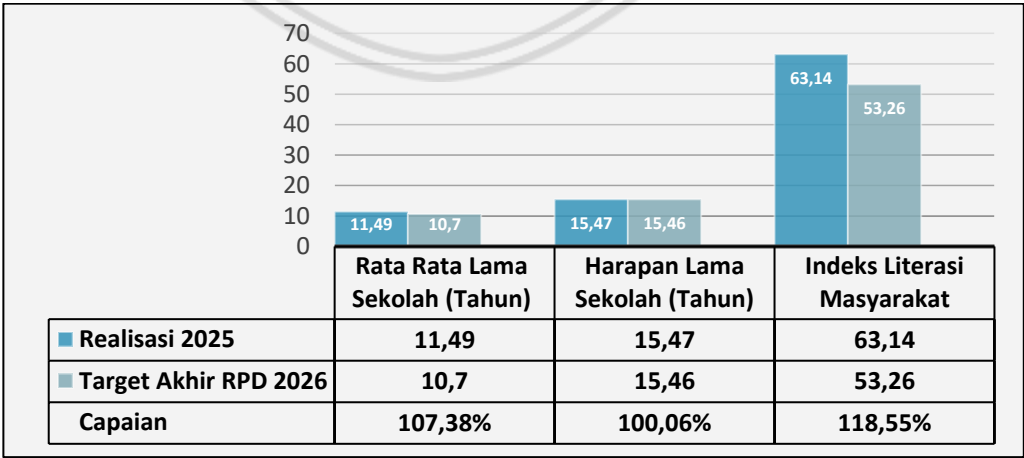
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tersaji dalam grafik berikut.

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2023-2025**



- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**  
Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas tahun 2025 dari 3 indikator kinerja sudah melebihi dari target akhir RPD 2026, tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas Tahun 2025**





dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 semua indikator pada sasaran ini sudah melebihi dari target yang diharapkan.

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah Kota salatiga tahun 2025 adalah 11,49 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 adalah 8,15 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Target nasional indeks literasi masyarakat adalah 71 sedangkan realisasi Kota salatiga baru mencapai 63,14 sehingga belum memenuhi target nasional

Indeks Literasi Masyarakat tahun 2025 terealisasi sebesar 63,14 sedangkan target nasional sebesar 71,00 sehingga untuk indikator ini belum memenuhi atau masih dibawah target nasional.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Untuk tingkat keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas diantaranya:

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, social, dan ekonomis. Pendidikan menjadi salah satu aspek indikator, dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 97,88%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,34%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 96,82%, angka partisipasi sekolah kesetaraan 71,05%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,005% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,058%. Sedangkan untuk indeks literasi masyarakat tingkat keberhasilan dikarenakan (1) ketersediaan koleksi yang memadai (2) peningkatan promosi literasi secara massif (3) peningkatan kegiatan literasi melui lomba dan peningkatan bunda literasi (4) terlaksananya trnasformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial



(5) penambahan sarana dan prasarana literasi sebagai perluasan layanan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas

| Indikator Kinerja                                                                                                                                   | Program                           | Anggaran       |                |         | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                                                                                                                                                     |                                   | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                   |
| Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas | Pengelolaan Pendidikan            | 41.630.345.713 | 40.643.220.772 | 97,63   |                   |
|                                                                                                                                                     | Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 18.009.477.499 | 16.670.806.299 | 92,57   |                   |
|                                                                                                                                                     | Pengendalian Perizinan Pendidikan | 15.454.900     | 6.824.900      | 44,16   |                   |
|                                                                                                                                                     | Pengembangan kurikulum            | 18.204.000     | 13.493.571     | 74,12   |                   |
|                                                                                                                                                     | Pengembangan Bahasa dan Sastra    | 319.385.500    | 281.470.844    | 88,13   |                   |
|                                                                                                                                                     | Pembinaan perpustakaan            | 2.215.044.815  | 2.045.663.806  | 92,35   |                   |

Sumber : Data yang diolah

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

- **Dinas Pendidikan**
  - 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, SMP dan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.
  - 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
  - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan.
  - 4) Program Pengembangan Kurikulum yang diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar.



- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, *workshop* serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra.

2. Sasaran Strategis II: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Sasaran Strategis II adalah Meningkatnya Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- 1. Persentase obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
  - 2. Persentase cagar budaya yang dilestarikan
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut adalah **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

2.1 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Realisasi kinerja pada indikator cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan

=

Jumlah cahar budaya,sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan

Jumlah seluruh cagar budaya sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang ditata

X 100%

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi Dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi Dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                              | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                                                                                                     |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | %      | 19         | 30         | 44,98      | 52                    |



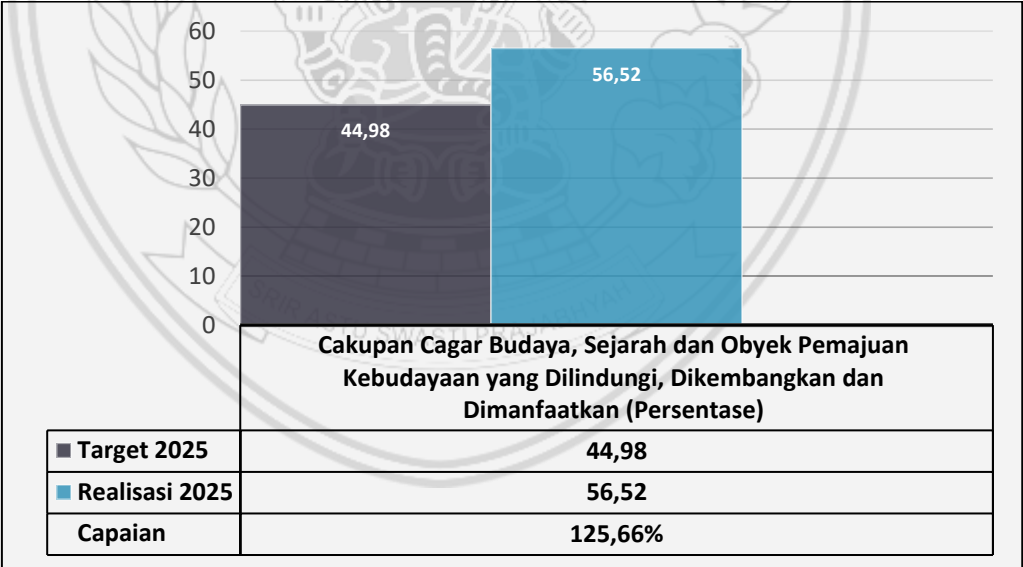
| Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                              | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Realisasi                                                                                                  |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | %      | 32,69      | 44,98      | 56,52      | -                     |
| Capaian Kinerja                                                                                            |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | %      | 172,05     | 149,93     | 125,7      | -                     |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

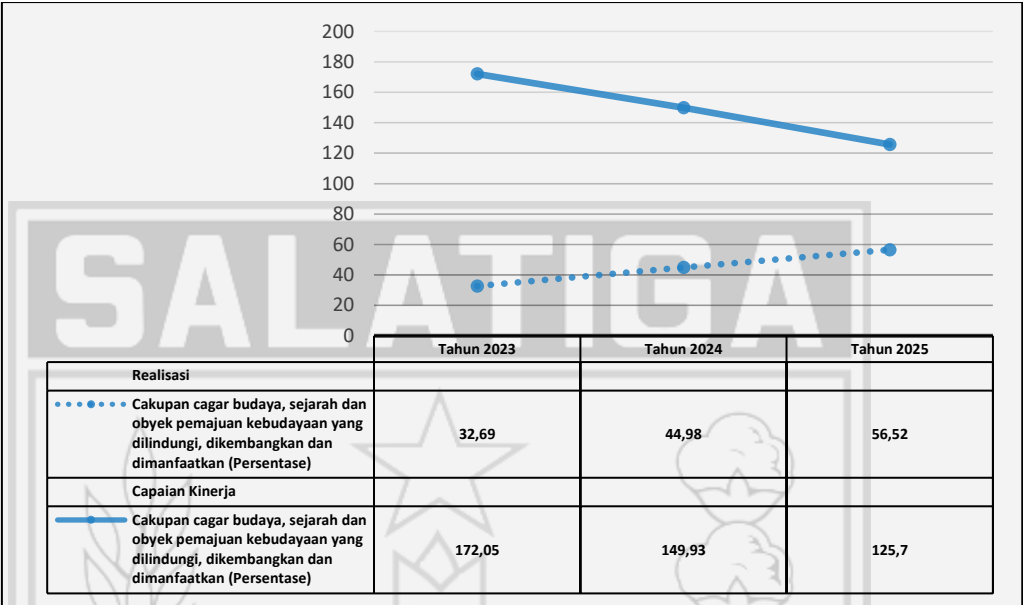
- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Tahun 2025 sebesar 44,98% dan terealisasi sebesar 56,52%, sehingga capaian indikator kinerja adalah 125,7% dengan kategori Sangat Baik.

Grafik 3.4  
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025



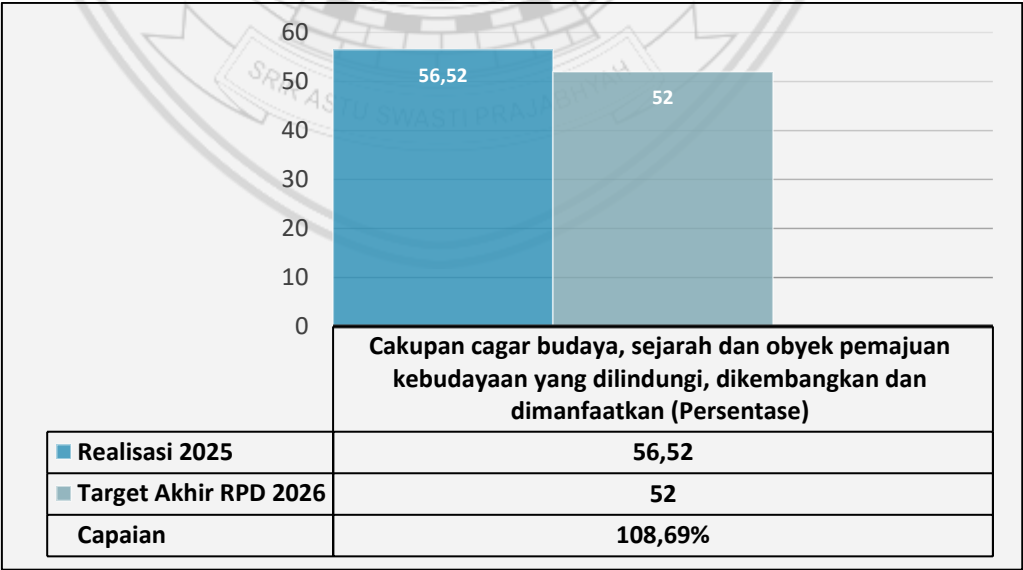
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi kinerja untuk Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan pada tahun 2025 terealisasi 56,52% dari target 44,98% bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik, Adapun data dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 3.5  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2023-2025



- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**
- Realisasi kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2025 sebesar 56,52% sedangkan target dalam RPD tahun 2025 sebesar 52% sehingga tahun 2025 ini sudah sudah melebihi dari target akhir RPD tahun 2026.

Grafik 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun 2025





d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- 1) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerhati seni budaya, sekolah/ perguruan tinggi, masyarakat, OPD/ instansi, dan Stakeholder dalam mengelola cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan.
- 2) Tingginya animo/ partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya daerah.
- 3) Kerjasama dan koordinasi yang maksimal dengan pemerhati seni budaya, pemerhati cagar budaya dan sejarawan, sekolah/ perguruan tinggi, pelaku pariwisata, masyarakat, OPD/ Instansi terkait dan stakeholder dalam menyelenggarakan dan mengembangkanserta mempromosikan obyek pemajuan budaya salatiga serta dilaksanakan pembinaan dan pelestarian cagar budaya secara berkala.
- 4) Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
- 5) Edukasi masyarakat dan sekolah tentang objek pemajuan budaya melalui lomba seni budaya dan berbagai pentas/ event pagelaran seni serta edukasi cagar budaya melalui sosialisasi hasil kajian cagar budaya dan lomba-lomba tentang cagar budaya.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah**

| Indikator Kinerja                                               | Program                                  | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                 |                                          | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah | Pengembangan Kebudayaan                  | 1.391.080.000 | 1.331.890.925 | 95,75   |                   |
|                                                                 | Pengembangan Kesenian Tradisional        | 54.500.000    | 52.365.950    | 96,08   |                   |
|                                                                 | Pembinaan Sejarah                        | 126.809.200   | 124.898.940   | 98,49   |                   |
|                                                                 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 48.320.000    | 40.120.000    | 83,03   |                   |
|                                                                 | Pengelolaan Permuseuman                  | 109.906.000   | 91.765.000    | 83,49   |                   |

Sumber : Data yang diolah



**g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

- **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.
- 2) Program Pengembangan kesenian tradisional yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.
- 3) Program Pembinaan Sejarah yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.
- 4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman yang diarahkan sasaran kegiatan pengelolaan museum kota.

**3. Sasaran Strategis III : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga**

Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Peningkatan Prestasi Olahraga
  2. Tingkat Peratisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga adalah Meningkatnya Prestasi dalam Olahraga dan Meningkatnya Partisipasi Pemuda dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Cakupan pembinaan Olahraga
2. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
3. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga adalah: **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

**3.1 Peningkatan Prestasi Olahraga**

Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan perhitungan dari jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.



3.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator ini dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%\right)}{2}$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

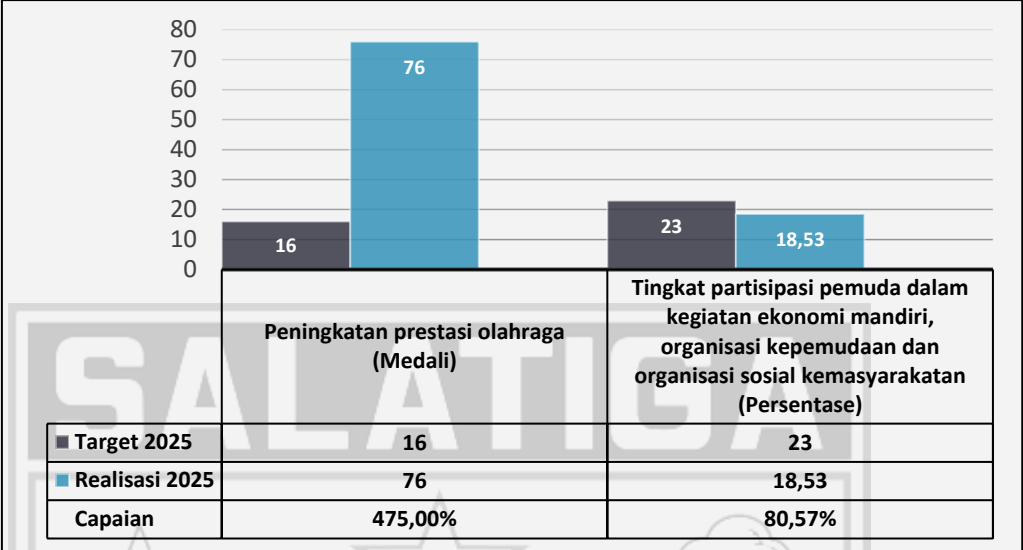
| Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                         | Satuan        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                                                                                                                |               |            |            |            |                       |
| Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | Jumlah Medali | 15         | 30         | 16         | 16                    |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %             | 20,59      | 20,59      | 23         | 21                    |
| Realisasi                                                                                                             |               |            |            |            |                       |
| Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | Jumlah Medali | 39         | 32         | 76         | -                     |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %             | 23,23      | 22,95      | 18,53      | -                     |
| Capaian Kinerja                                                                                                       |               |            |            |            |                       |
| Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | %             | 260        | 106,66     | 475        | -                     |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %             | 112,82     | 111,46     | 80,6       | -                     |

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

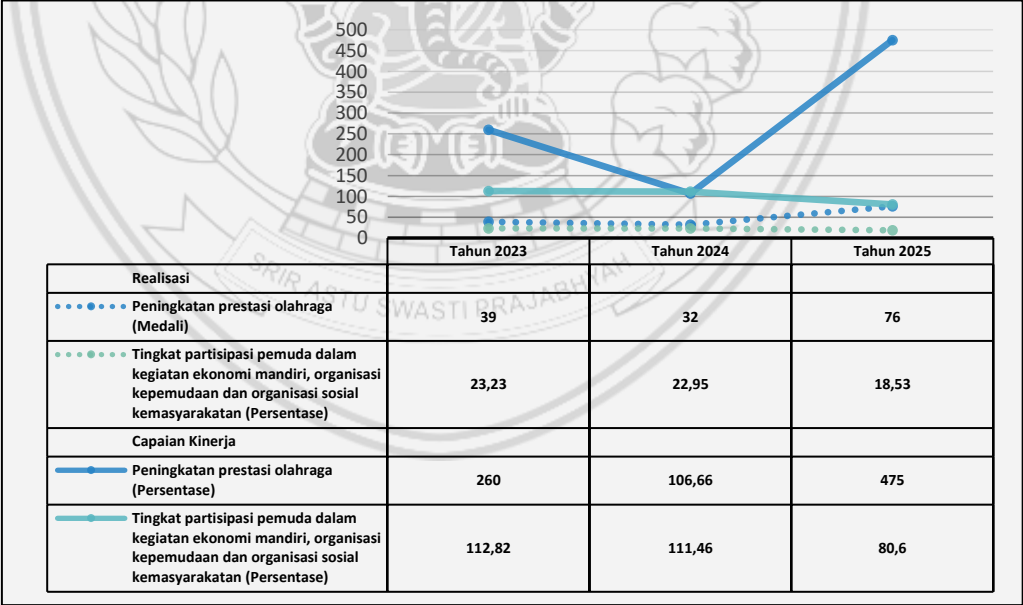
- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target sasaran Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator kinerja dapat terealisasi diatas target yang ditentukan, selanjutnya dapat dilihat dari grafik berikut.

**Grafik 3.7**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2025**



b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2025 realisasi dari 2 indikator ini 1 dapat tercapai diatas 100% dan 1 indikator tercapai 88,2 akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 ada 1 indikator yang mengalami penurunan capaian kinerjanya, Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.

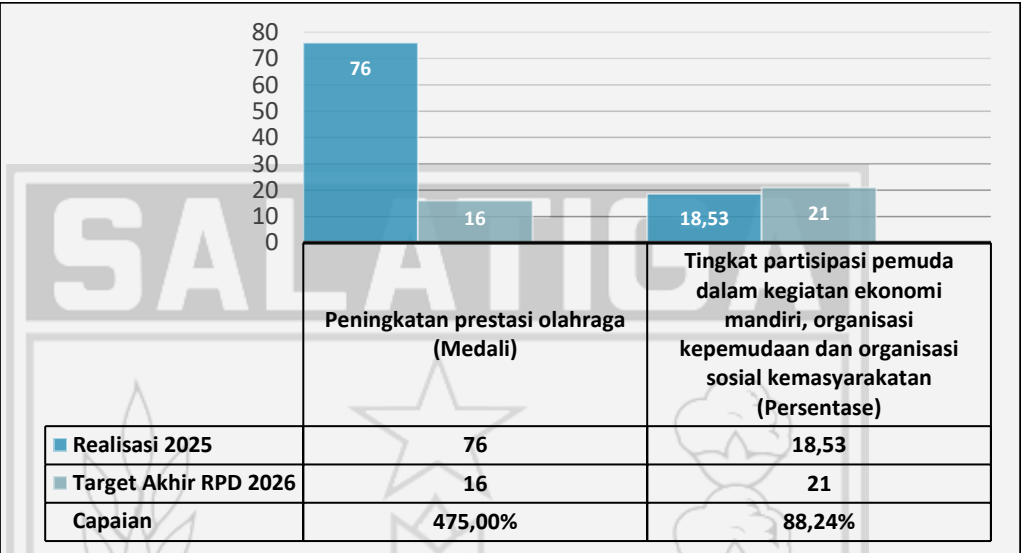
**Grafik 3.8**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2025**



c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**  
Realisasi Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2025 untuk 2 indikator ini terdapat 1 indikator yang belum tercapai di tahun ini akan tetapi bila dibandingkan dari target

RPD 2026 indikator ini sudah tercapai dari target RPD ditentukan, Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2025**



- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**  
Tidak ada standar nasional dalam indikator Peningkatan prestasi olahraga.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
Keberhasilan untuk indikator ini Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Pembinaan olahraga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas.
  - 2) Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi baru dalam bidang olahraga.
  - 3) Meningkatkan keikutsertaan atlet-atlet lokal pada berbagai event olahrag baik di level lokal antar daerah maupun internasional.
  - 4) Mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga dilingkungan masyarakat, baik di level kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**  
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja**  
**Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga**

| Indikator Kinerja             | Program                                        | Anggaran       |                |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                               |                                                | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                   |
| Peningkatan prestasi olahraga | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 12.340.111.200 | 11.938.583.611 | 96,75   |                   |



| Indikator Kinerja | Program                                      | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                   |                                              | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
|                   | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1.061.011.100 | 864.440.978   | 81,47   |                   |
|                   | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan           | 1.921.871.200 | 1.804.282.816 | 93,88   |                   |

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Peningkatan prestasi olahraga sebesar 99,63%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Angka Harapan Hidup
  2. Laju Pertumbuhan Penduduk.
- Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup adalah:
1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
    - a. Angka Kematian Ibu;
    - b. Angka Kematian Bayi;
    - c. Prevalensi Balita Gizi Buruk;
    - d. Sukses Rate TB;
    - e. Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun.
  2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
    - a. Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama;
    - b. Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

- Dinas Kesehatan



4.1 Angka Harapan Hidup

Definisi Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Harapan Hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan nilai pola mortalitas menurut umur. Perhitungan Angka Harapan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Definisi Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

*Metode geometri*

*r : Laju pertumbuhan penduduk*

*P<sub>t</sub> : Jumlah penduduk tahun t*

*P<sub>0</sub> : Jumlah penduduk tahun awal*

*t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)*

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

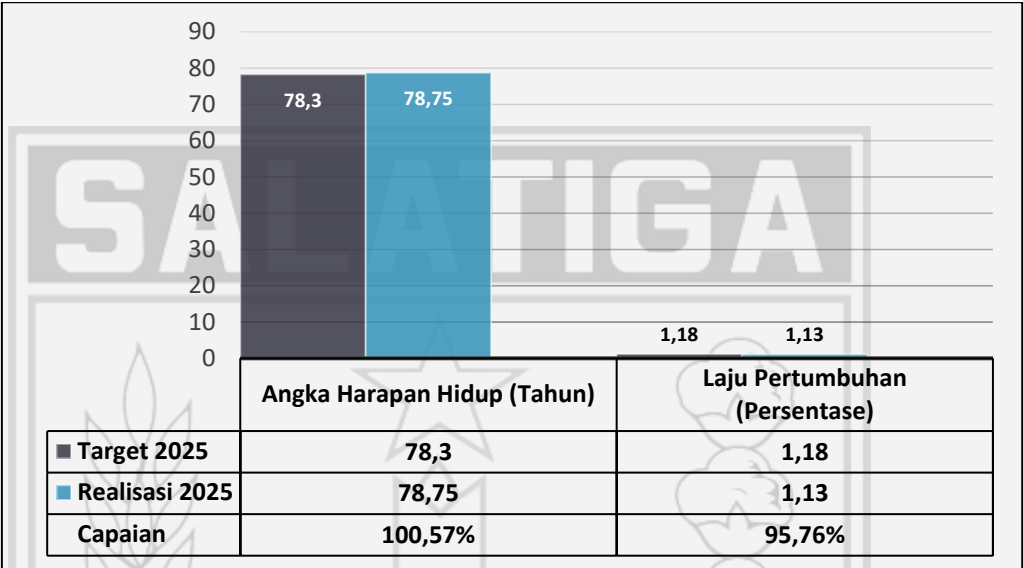
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                        |        |            |            |            |                       |
| Angka Harapan Hidup           | Tahun  | 77,67      | 77,78      | 78,30      | 77,98                 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk     | %      | 1,34       | 1,32       | 1,18       | 1,30                  |
| Realisasi                     |        |            |            |            |                       |
| Angka Harapan Hidup           | Tahun  | 77,93      | 77,93      | 78,75      | -                     |
| Laju Pertumbuhan Penduduk     | %      | 1,21       | 1,18       | 1,13       | -                     |
| Capaian Kinerja               |        |            |            |            |                       |
| Angka Harapan Hidup           | %      | 100,33     | 100,19     | 100,57     | -                     |
| Laju Pertumbuhan Penduduk     | %      | 109,70     | 89,39      | 95,76      | -                     |

Sumber : BPS

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

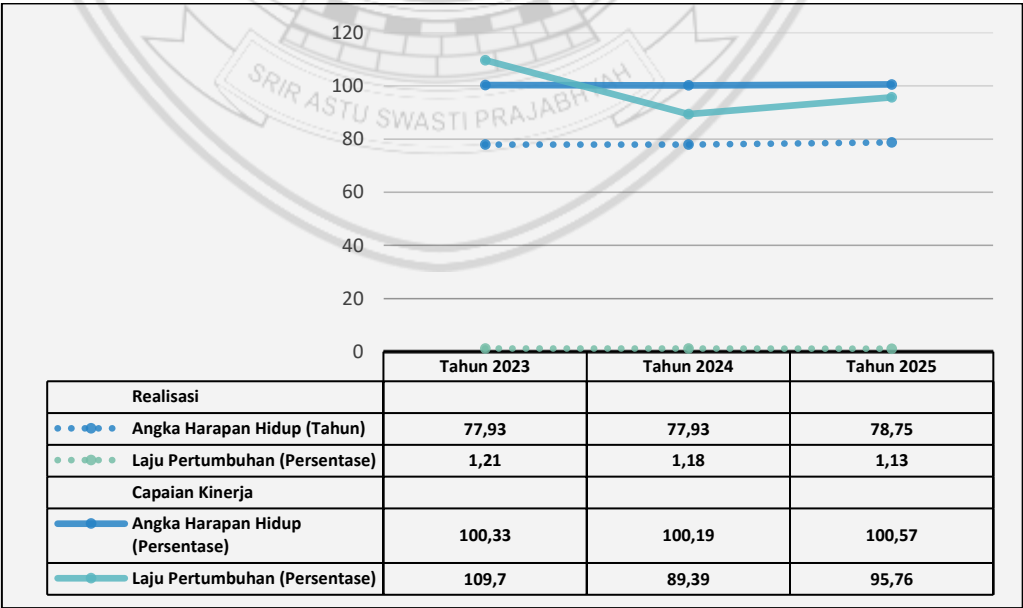
- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2025.

**Grafik 3.10**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025**



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2025 bila dibandingkan realisasi tahun 2024 dan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Data realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada grafik berikut.

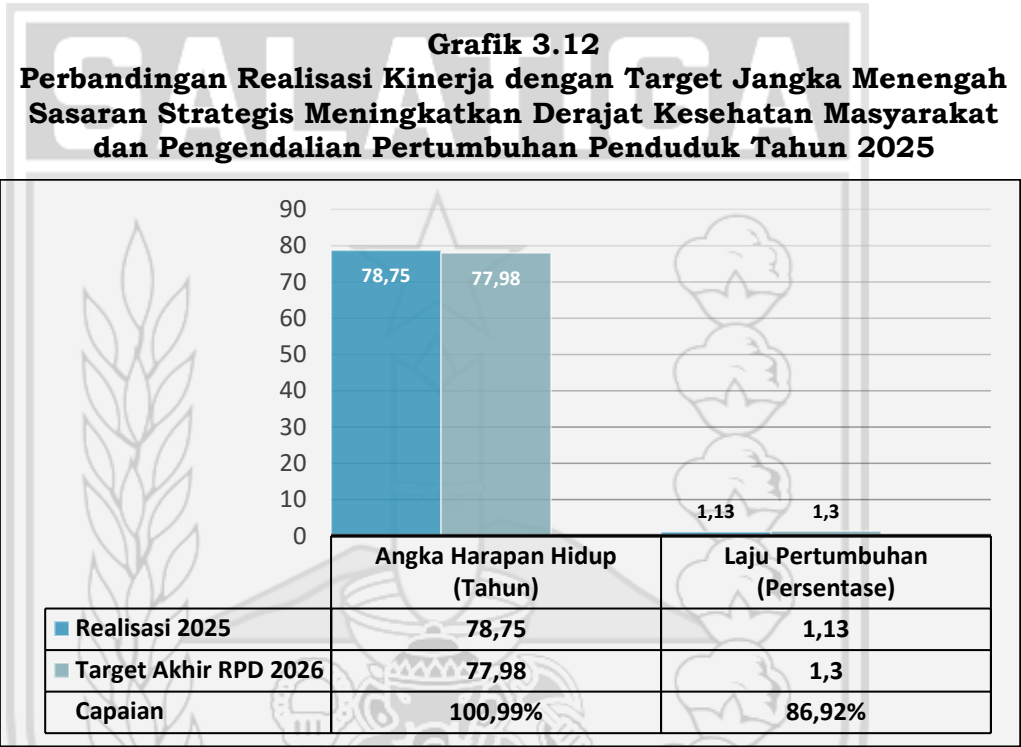
**Grafik 3.11**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023-2025**





c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**

Realisasi sasaran kinerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2025 untuk indikator Angka Harapan Hidup sudah memenuhi target akhir RPD sedangkan untuk Laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 sebesar 1,13 sedangkan target akhir RPD sebesar 1,30 masih belum memenuhi dari target yang ditetapkan. Data caapaian indikator 2025 dan target RPD 2026 dapat dilihat pada grafik berikut.



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Berdasarkan data BPS tahun 2025, angka harapan hidup di Indonesia mencapai 74,47 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Angka Harapan Hidup sudah mencapai 78,75 tahun, dengan demikian Angka Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator angka harapan hidup ini adalah:

- 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, yang ditunjukkan dengan seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah telah terakreditasi paripurna sehingga mendorong terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang lebih aman,bermutu, dan berkesinambungan.
- 2) Penguatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak yang berdampak pada menurunnya jumlah kematian ibu.
- 3) Pengendalian penyakit tidak menular serta deteksi dini dan pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi yang

berkontribusi pada menurunnya risiko kesakitan dan kematian pada usia produktif dan lanjut usia.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harapan hidup dengan penguatan intervensi Kesehatan yang berfokus pada upaya promotive dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak, percepatan penanggulangan masalah gizi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara terpadu.

- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**
- Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

| Indikator Kinerja                                                               | Program                                                             | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                                 |                                                                     | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3.263.289.000 | 3.209.790.413 | 98,36   |                   |
|                                                                                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 389.355.000   | 381.006.250   | 97,86   |                   |
|                                                                                 | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | 230.601.000   | 190.262.458   | 82,51   |                   |
|                                                                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan                         | 0             | 0             | 0       |                   |
|                                                                                 | Pengendalian Penduduk                                               | 556.672.000   | 500.376.800   | 89,89   |                   |
|                                                                                 | Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | 1.673.905.411 | 1.495.231.416 | 89,33   |                   |
|                                                                                 | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                | 1.268.051.000 | 1.241.143.672 | 97,88   |                   |

Sumber : Data yang diolah

- g. **Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program sebagai berikut:

- **Dinas Kesehatan**
  - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diarahkan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
  - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan pengembangan



mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota.

- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat Kota dan pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat Kota.

## 5. Sasaran Strategis V: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk

Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan per kapita

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan (IKD) Persentase koperasi aktif:
2. Meningkatnya jumlah UKM dengan (IKD) Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Dinkop Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

3. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kuantitas dan kualitas dengan IKD:
  - a. Persentase pertumbuhan IKM (industri kecil menengah);
  - b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
4. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dengan IKD Tingkat Produktivitas tenaga Kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

5. Meningkatnya pendapatan daerah dengan IKD Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**



6. Meningkatnya kinerja perdagangan dengan IKD Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Perdagangan**

7. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan dengan IKD

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
- b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
- c. Tingkat hunian akomodasi;
- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku;
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

8. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta katahanan pangan masyarakat dengan IKD

- a. Pruduktivitas padi;
- b. Peningkatan produktivitas tananman hortikultura;
- c. Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi;
- d. Produktivitas Sapi perah;
- e. Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi);
- f. Peningkatan produksi perikanan (benih);
- g. Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis;
- h. Ketersediaan beras.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Pangan dan Pertanian**

**5.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Dimana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

**5.2 Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)**

Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) mengukur nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) dengan menggunakan harga tahun dasar yang tetap atau konstan.



Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan**  
**Pendapatan Perkapita Penduduk**

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Target</b>                 |             |            |            |            |                       |
| Pertumbuhan Ekonomi           | %           | 4,71       | 4,84       | 5,40       | 4,86-5,51             |
| Pendapatan Per Kapita         | juta rupiah | 54,11      | 55,80      | 57,90      | 59,16                 |
| <b>Realisasi</b>              |             |            |            |            |                       |
| Pertumbuhan Ekonomi           | %           | 5,34       | 4,48       | 5,98       | -                     |
| Pendapatan Per Kapita         | juta rupiah | 54,89      | 57,48      | 95,23      |                       |
| <b>Capaian Kinerja</b>        |             |            |            |            |                       |
| Pertumbuhan Ekonomi           | %           | 113,38     | 114,44     | 110,74     | -                     |
| Pendapatan Per Kapita         | juta rupiah | 101,44     | 154,44     | 164,47     |                       |

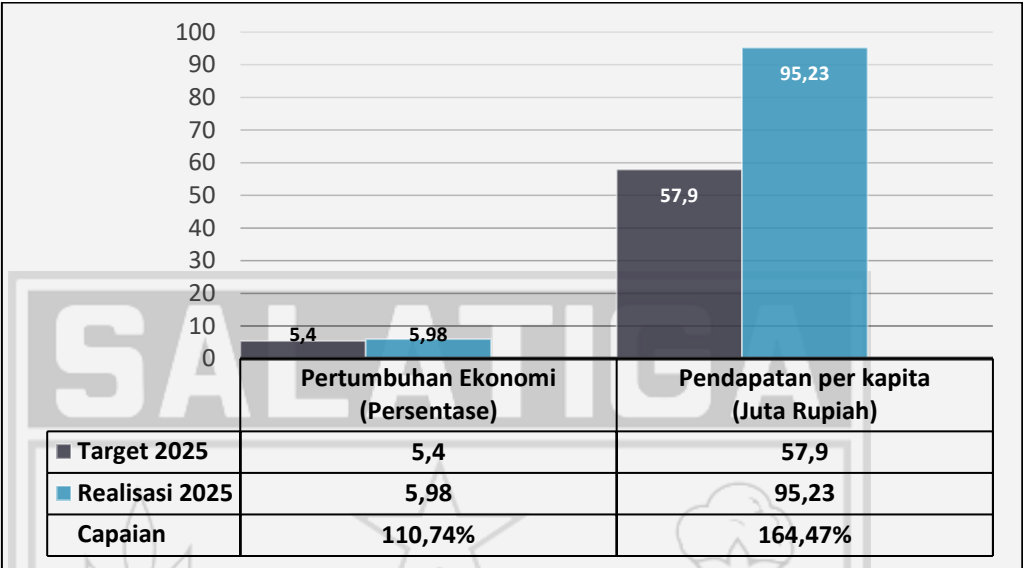
Sumber : BPS

Sasaran menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Sasaran indikator menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2025 ini kedua Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai target yang ditentukan, Adapun data masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data belum rilis. dapat dilihat dari grafik berikut.



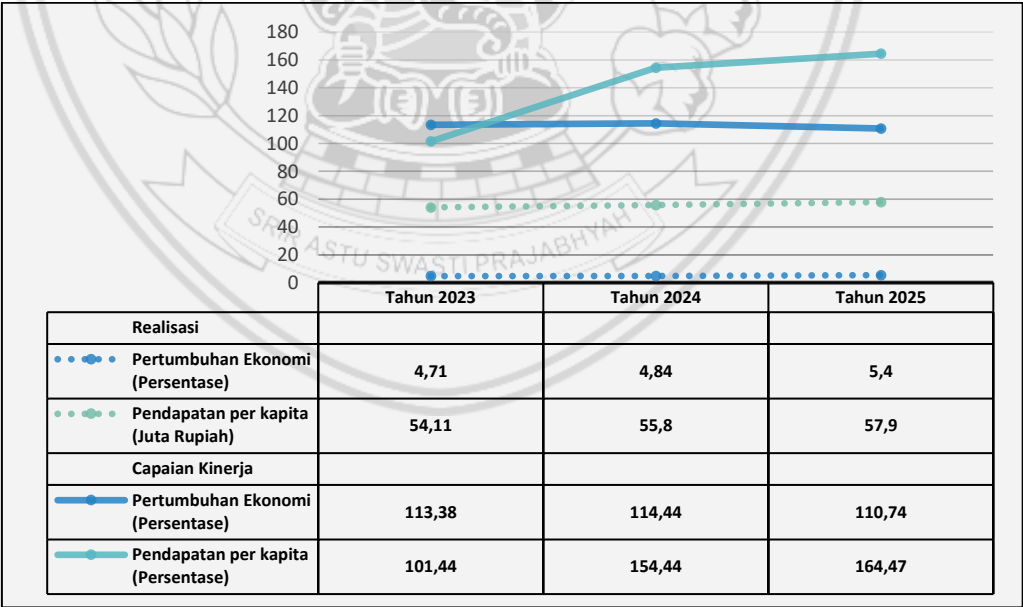
Grafik 3.13  
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita  
Penduduk Tahun 2025



b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Realisasi kinerja untuk indikator pada Sasaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2025 realisasi dan capaian terus mengalami kenaikan dan dapat terealisasi melebihi dari target yang ditentukan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.14  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita  
Penduduk Tahun 2023-2025



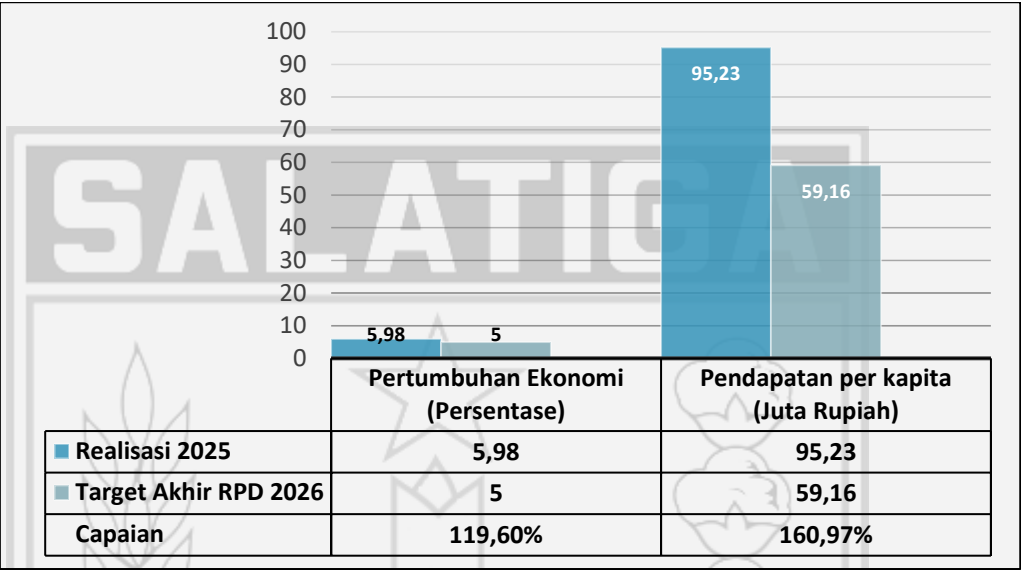
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)

Realisasi untuk indikator pada Sasaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk



tahun 2025 bila dibandingkan dengan target RPD 2026, untuk indikator ini ditahun 2025 sudah tercapai target yang ditentukan. Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan**  
**Pendapatan Perkapita Penduduk Tahun 2025**



**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada 2025 tercatat sebesar 5,98% masih lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 5,05%.
- 2) Pendapatan per kapita kota Salatiga Tahun 2025 tercatat sebesar 95,23%

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Kondisi sosial yang stabil dan kualitas hidup yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi penduduk dan pengusaha untuk tinggal dan berinvestasi.
- 2) Mendorong inovasi dan kewirausahaan sehingga menciptakan lapangan kerja, produk dan layanan baru, serta meningkatkan daya saing.
- 3) Kemitraan yang kuat antara pemerintah kota, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah sehingga memobilisasi investasi dan sumber daya yang diperlukan.
- 4) Kebijakan atau regulasi yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.11  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja  
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita  
Penduduk

| Indikator Kinerja                                                 | Program                                                                                    | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                   |                                                                                            | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk | Pengawasan dan pemeriksaan koperasi                                                        | 188.814.457   | 183.485.030   | 97,18   |                   |
|                                                                   | Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi                                                       | 70.537.000    | 68.419.050    | 97,00   |                   |
|                                                                   | Pendidikan dan Latihan perkoperasian                                                       | 326.170.000   | 323.276.599   | 99,11   |                   |
|                                                                   | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi                                                     | 198.551.999   | 150.261.744   | 75,68   |                   |
|                                                                   | Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dann usaha mikro                                  | 2.132.304.732 | 1.811.776.730 | 84,97   |                   |
|                                                                   | Hubungan industrial                                                                        | 586.293.948   | 576.379.750   | 98,31   |                   |
|                                                                   | Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                                             | 646.644.256   | 597.424.332   | 92,39   |                   |
|                                                                   | Penempatan tenaga kerja                                                                    | 170.000.000   | 161.257.820   | 94,86   |                   |
|                                                                   | Pengelolaan keuangan daerah                                                                | 3.510.053.800 | 2.113.642.650 | 60,22   |                   |
|                                                                   | Pengelolaan barang milik daerah                                                            | 2.394.438.055 | 1.854.929.064 | 77,47   |                   |
|                                                                   | Pengelolaan pendapatan daerah                                                              | 3.366.821.095 | 1.373.365.494 | 40,79   |                   |
|                                                                   | Perizinan dan pendaftaran perusahaan                                                       | 6.316.000     | 5.920.200     | 93,73   |                   |
|                                                                   | Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan                                    | 2.186.094.826 | 1.954.595.844 | 89,41   |                   |
|                                                                   | Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting                                | 17.165.800    | 17.165.000    | 100     |                   |
|                                                                   | Pengembangan ekspor                                                                        | 0             | 0             | 0       |                   |
|                                                                   | Standarisasi dan perlindungan konsumen                                                     | 25.385.000    | 24.871.800    | 97,98   |                   |
|                                                                   | Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata                                                | 610.232.790   | 439.741.900   | 72,06   |                   |
|                                                                   | Pemasaran pariwisata                                                                       | 1.319.585.593 | 901.379.075   | 68,31   |                   |
|                                                                   | Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | 23.477.200    | 22.671.300    | 96,57   |                   |
|                                                                   | Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                    | 19.219.000    | 15.080.000    | 78,46   |                   |
|                                                                   | Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                                               | 716.768.600   | 457.998.235   | 63,90   |                   |
|                                                                   | Penyuluhan pertanian                                                                       | 128.579.200   | 122.352.971   | 95,16   |                   |
|                                                                   | Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                          | 58.157.800    | 42.955.400    | 73,86   |                   |
|                                                                   | Pengelolaan perikanan budidaya                                                             | 222.603.000   | 207.675.084   | 93,29   |                   |



| Indikator Kinerja | Program                                                                 | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                   |                                                                         | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
|                   | Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan                               | 150.374.000   | 98.090.105    | 65,23   |                   |
|                   | Penegndalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner         | 593.137.000   | 170.767.664   | 28,79   |                   |
|                   | Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | 1.111.158.800 | 1.033.599.791 | 93,02   |                   |
|                   | Pengawasan keamanan pangan                                              | 79.600.200    | 69.395.578    | 87,18   |                   |
|                   | Penanganan kerawanan pangan                                             | 22.320.000    | 16.598.304    | 74,37   |                   |

Sumber : Data yang diolah

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini adalah:

- **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
  - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.
  - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.
  - 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.
  - 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.
  - 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang iarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.
- **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**



- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta.
  - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah.
  - 3) Program Hubungan Industrial dengan sasaran kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**
    - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
    - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.
    - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.
  - **Dinas Perdagangan**
    - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
    - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
    - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah.
    - 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
    - 5) Program Pemasaran ekspor dengan sasaran kegiatan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.



- **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan capaian program jumlah peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

- **Dinas Pangan dan Pertanian**

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).



- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian,
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.
- 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.
- 10) Program Penyuluhan Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

**6. Sasaran Strategis VI: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga**

Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Pertumbuhan Nilai Investasi
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada



Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga adalah:

1. Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD):
  - a. Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
  - b. Persentase kenaikan nilai investasi PMDN
  - c. Persentase kenaikan nilai investasi PMA

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah

➤ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
3. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja dengan variable Indikator Kinerja Daerah (IKD):
  - a. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin
  - b. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu tenaga kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

### 6.1 Pertumbuhan Nilai Investasi

Pertumbuhan nilai investasi adalah peningkatan dalam jumlah atau nilai total investasi yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu dalam suatu periode waktu tertentu. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan nilai investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan formulasi sebagai berikut :

*Pertumbuhan Nilai Investasi*

$$= \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

### 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran persentase dari jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya dalam suatu populasi tertentu, seperti populasi pekerja atau angkatan kerja

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

*Tingkat Pengangguran Terbuka*

$$= \frac{\text{jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$$



6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam pekerjaan yang dipekerjakan maupun mencari pekerjaan. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$$= \frac{\text{jumlah penduduk bekerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga.

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga

| Indikator Kinerja Utama (IKU)      | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025  | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| Target                             |        |            |            |             |                       |
| Pertumbuhan Nilai Investasi        | %      | 10,00      | 10,22      | 10,4        | 10,55                 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka       | %      | 6,76       | 6,52       | 2,54-3,67   | 6,46-5,51             |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %      | 69,71      | 69,84      | 70,85-71-62 | 70,1                  |
| Realisasi                          |        |            |            |             |                       |
| Pertumbuhan Nilai Investasi        | %      | 52,17      | 6,89       | 76,91       | -                     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka       | %      | 4,57       | 3,86       | 3,67        | -                     |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %      | 72,09      | 70,72      | 70,93       | -                     |
| Capaian Kinerja                    |        |            |            |             |                       |
| Pertumbuhan Nilai Investasi        | %      | 521,70     | 105,7      | 736,52      | -                     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka       | %      | 132,40     | 129,95     | 100,00      | -                     |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %      | 103,41     | 101,26     | 100,2       | -                     |

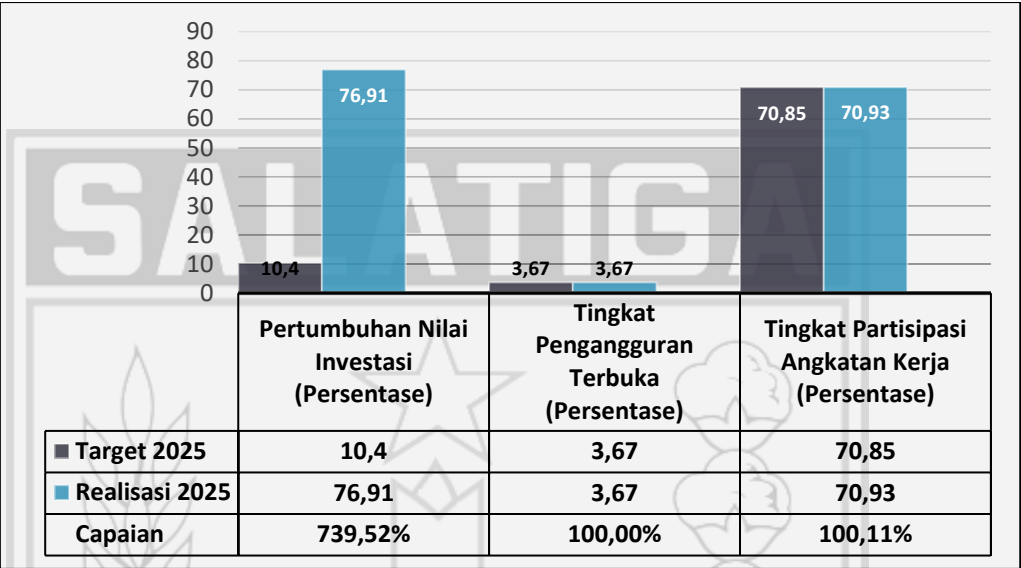
Sumber : BPS dan DPMPTSP

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Target indikator pada sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas

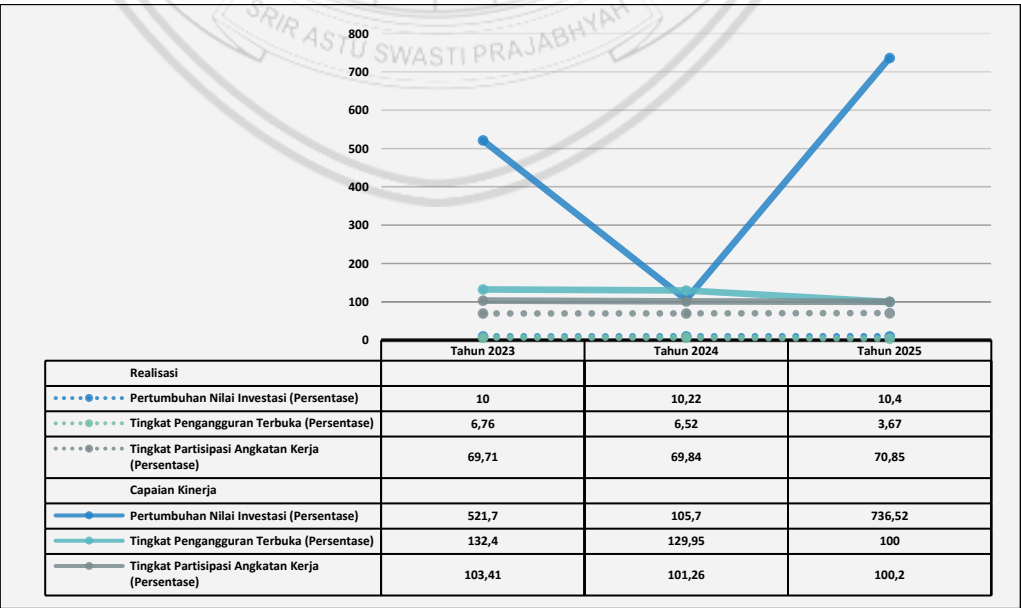
kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.16**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2025**



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi kinerja sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun lalu terus mengalami peningkatan kinerjanya.

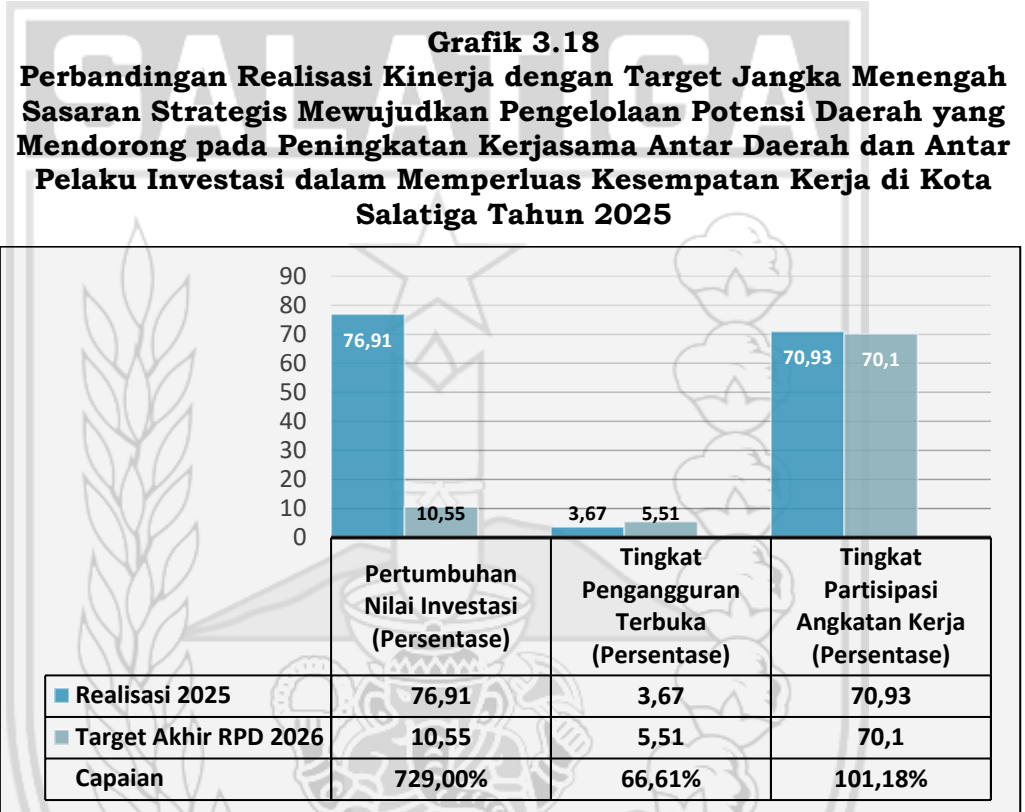
**Grafik 3.17**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2023-2025**





c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Realisasi kinerja untuk kinerja sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2025 bila dibandingkan dengan terget akhir RPD untuk indikator ini 2 indikator sudah memenuhi target dan 1 indikator belum mencapai target yang ditentukan, sebagaimana grafik berikut.



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Target Nasional indikator pertumbuhan investasi adalah 11,7% sedangkan realisasi Kota Salatiga sebesar 76,91 sehingga sudah mencapai 688,81%.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:

**Peningkatan investasi**

- 4. Kondusifnya iklim investasi di Kota Salatiga kondusif dalam hal keamanan dan stabilitas lingkungan
- 5. Promosi potensi peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan daya Tarik investasi
- 6. Tambahan investasi dari belanja modal tetap pelaku usaha meningkat dari tahun sebelumnya

Upaya untuk mempertahankan keberhasilan diantaranya:

- Kemudahan investasi melalui integrasi RTDR dengan OSS dan penguatan ekosistem digital untuk kepastian izin lokasi



usaha dan peningkatan kualitas SDM local melalui kemitraan antara investor dengan SMK atau universitas program vokasi.

- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**  
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga**

| Sasaran                                                                                                                                                         | Program                                               | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                       | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga | Pengembangan iklim penanaman modal                    | 200.870.000   | 185.002.100   | 92,01   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Promosi penanaman modal                               | 104.728.000   | 86.527.000    | 82,62   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pelayanan penanaman modal                             | 62.700.000    | 50.822.550    | 81,06   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal              | 118.156.174   | 50.237.900    | 40,52   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 0             | 0             | 0       |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja        | 1.310.000.000 | 1.251.035.266 | 95,50   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Penempatan tenaga kerja                               | 217.910.000   | 207.956.100   | 95,43   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Perencanaan dan pembangunan industri                  | 896.331.612   | 638.947.342   | 71,28   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pengendalian izin usaha industry kabupaten/kota       | 36.080.640    | 19.275.850    | 53,42   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pengelolaan sistem informasi industry nasional        | 16.640.700    | 11.252.655    | 67,62   |                   |
|                                                                                                                                                                 | Pembangunan Kawasan transmigrasi                      | 49.650.000    | 21.952.000    | 44,21   |                   |

Sumber : Data yang diolah

- g. **Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Dalam upaya pencapaian target indikator Pertumbuhan nilai investasi di dukung oleh Program antara lain:
- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
    - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pembuatan dokumen pendukung iklim penanaman modal.



- 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

## 7. Sasaran Strategis VII: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

### 7.1 Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani;
- b. Angka Kemiskinan.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah: **Dinas Sosial**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

*Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS*

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk terdata dalam DTKS}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang memenuhi}} \times 100\%$$

### 7.2 Pola Pangan Harapan

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan adalah meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:



a. Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan;  
b. Ketersediaan energi per kapita;  
c. Ketersediaan protein per kapita.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah: **Dinas Pangan dan Pertanian**

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di wilayah tertentu. PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pola Harapan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Pola Pangan Harapan} = \text{Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot tiap kelompok pangan}$$

7.3 Persentase Peminat Transmigrasi

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peminat Transmigrasi adalah Meningkatnya minat untuk menjadi transmigrasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu Persentase peningkatan peminat transmigrasi.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah: **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Peminat Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peminat Transmigrasi} = \frac{\text{Jumlah calon transmigran yang berminat}}{\text{Peserta penyuluhan catran}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.14  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis  
Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                              | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                                                     |        |            |            |            |                       |
| Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | %      | 94,5       | 95         | 97,03      | 96                    |
| Pola Pangan Harapan                                        | Skor   | 92,2       | 94,4       | 96,60      | 97                    |
| Persentase Peminat Transmigrasi                            | %      | 3,3        | 3,7        | 4,07       | 4,6                   |

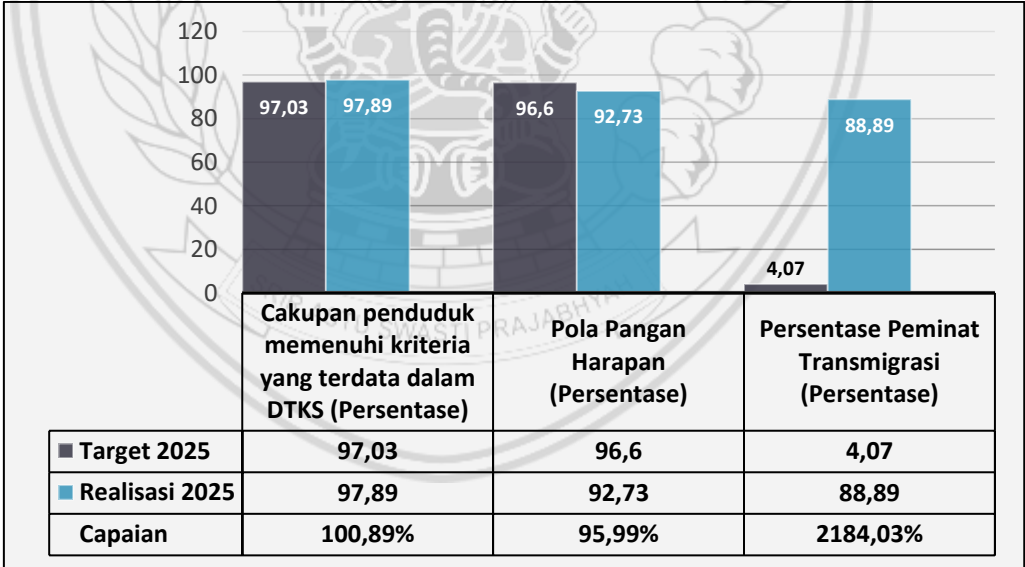
| Indikator Kinerja Utama (IKU)                              | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Realisasi                                                  |        |            |            |            |                       |
| Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | %      | 94,56      | 97,01      | 97,89      | -                     |
| Pola Pangan Harapan                                        | %      | 100,22     | 94,4       | 92,73      | -                     |
| Persentase Peminat Transmigrasi                            | %      | 25         | 20         | 88,89      | -                     |
| Capaian Kinerja                                            |        |            |            |            |                       |
| Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | %      | 100,06     | 102,12     | 100,89     | -                     |
| Pola Pangan Harapan                                        | %      | 100,22     | 100        | 95,99      | -                     |
| Persentase Peminat Transmigrasi                            | %      | 757,58     | 540,54     | 2.184,03   | -                     |

Sumber : Dinas Sosial

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial Tahun 2025 untuk capaian IKU dapat tercapai 2 indikator sedangkan 1 IKU tidak dapat tercapai.

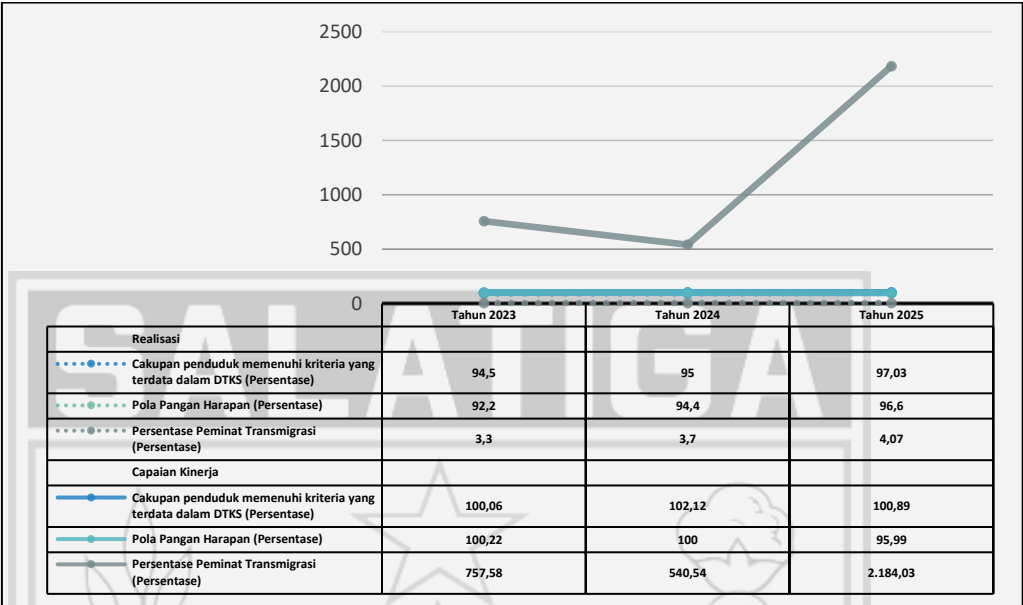
**Grafik 3.19**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2025**



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**  
Realisasi kinerja untuk Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial tahun 2025.

Grafik 3.20

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023-2025

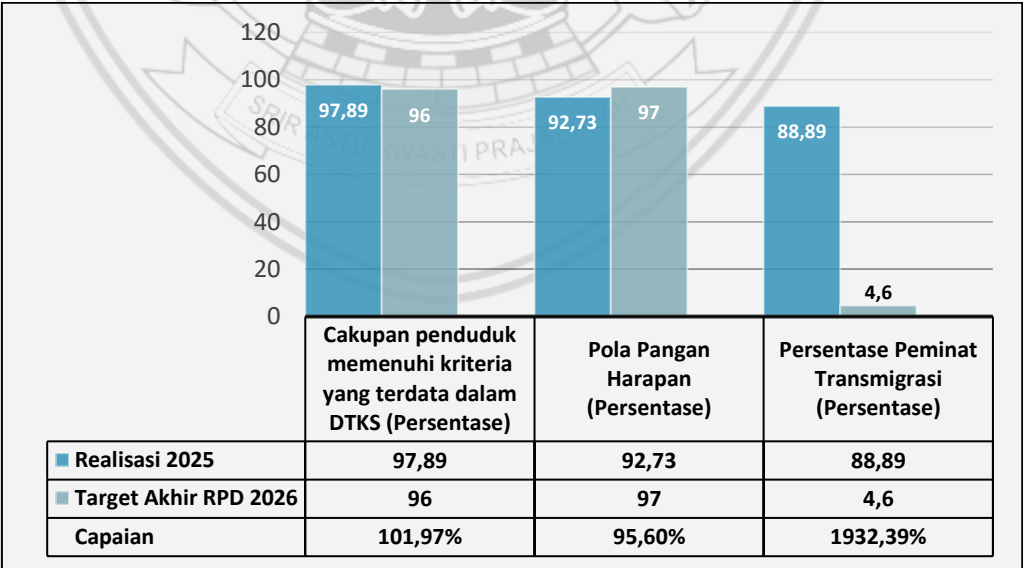


c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Realisasi kinerja untuk indikator Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial tahun 2025 dari 3 indikator masih terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target pada akhir RPD, dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2025



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada target standar nasional untuk indikator ini



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:  
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

- 1) Koordinasi lintas sektor yang efektif
- 2) Peningkatan kapasitas SDM pengelola DTKS/DTSN
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala
- 4) Integrasi dan sinkronisasi data program
- 5) Mekanisme partisipatif masyarakat
- 6) Komitmen Lembaga dan kepatuhan terhadap regulasi

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.15**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial**

| Sasaran                                                                                            | Program                                                   | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                                                    |                                                           | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial | Pemberdayaan Sosial                                       | 643.837.300   | 581.138.013   | 90,26   |                   |
|                                                                                                    | Rehabilitasi Sosial                                       | 1.136.830.800 | 1.055.440.330 | 92,84   |                   |
|                                                                                                    | Perlindungan dan jaminan sosial                           | 1.212.640.000 | 1.065.095.992 | 87,83   |                   |
|                                                                                                    | Penanganan Bencana                                        | 35.195.000    | 35.119.000    | 99,78   |                   |
|                                                                                                    | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                          | 123.207.300   | 112.953.936   | 91,68   |                   |
|                                                                                                    | Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | 535.003.400   | 455.368.469   | 85,12   |                   |
|                                                                                                    | Pembangunan Kawasan transmigrasi                          | 49.650.000    | 21.952.000    | 44,3    |                   |
|                                                                                                    |                                                           |               |               |         |                   |

Sumber : Data yang diolah

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS antara lain:

• Dinas Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mencapai indikator kinerja persentase terbentuknya lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan



pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
- 4) Program Penanganan Bencana dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan sasaran kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota.

- **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah kab/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 daerah.

- **Dinas Pangan dan Pertanian**

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kab/kota, penyediaan pangan berbasis sumber daya local, pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan kab/kota, penyusunan neraca bahan makanan, pengelolaan dan kesinambungan cadangan pangan kab/kota serta cadangan pangan pemerintah kab/kota.

## **8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

### **8.1 Score Capaian Kota Layak Anak (KLA)**

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Score Capaian (KLA) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative.

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi skor KLA dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan



Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor KLA} = & \text{Skor Aspek Kelembagaan} + \text{Skor Nilai Kluster 1} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 2} + \text{Skor Nilai Kluster 3} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 4} + \text{Skor Nilai Kluster 5} \\ & + \text{Skor Nilai Kecamatan / Desa} \\ & / \text{Kelurahan Layak Anak} \end{aligned}$$

8.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IDG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{IDG} = \frac{I_{(\text{par})} + I_{(\text{DM})} + I_{(\text{inc-des})}}{3}$$

8.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IPG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{IPG} = \frac{\text{IPM}_P}{\text{IPM}_L} \times 100$$

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



Berikut tabel capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender.

**Tabel 3.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender**

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Target</b>                 |        |            |            |            |                       |
| Skor capaian KLA              | Nilai  | 615        | 620        | 625        | 630                   |
| IDG                           | Nilai  | 80         | 80,05      | 81         | 81,5                  |
| IPG                           | Nilai  | 95         | 95,5       | 96         | 96,5                  |
| <b>Realisasi</b>              |        |            |            |            |                       |
| Skor capaian KLA              | Nilai  | 611        | 611        | 682,21     | -                     |
| IDG                           | Nilai  | 79,48      | 79,48      | 65,05      | -                     |
| IPG                           | Nilai  | 95,45      | 95,59      | 95,59      | -                     |
| <b>Capaian Kinerja</b>        |        |            |            |            |                       |
| Skor capaian KLA              | %      | 99,35      | 98,55      | 109,15     | -                     |
| IDG                           | %      | 99,35      | 98,73      | 80,31      | -                     |
| IPG                           | %      | 100,47     | 99,95      | 99,57      | -                     |

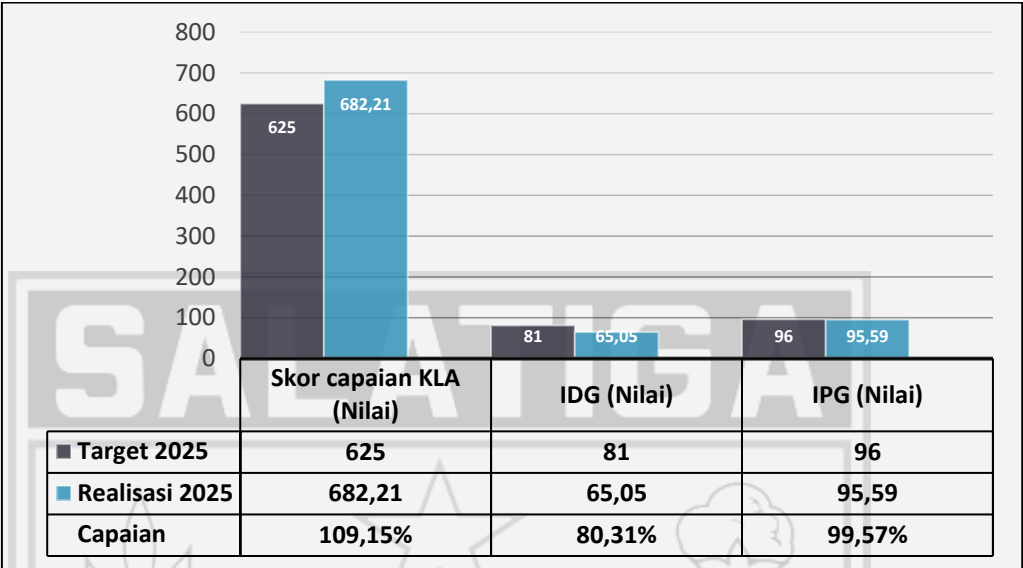
Sumber : DP3APPKB

Indikator sasaran kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Realisasi kinerja tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan untuk Skor KLA penilaian dilakukan 2 tahun sekali dan untuk IPG dan IDG masih menunggu rilis dari BPS. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target sasaran kinerja Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tahun 2025 dari ketiga indikator kinerja masih belum tercapai 100%, masih terdapat 2 indikator yang masih dibawah target dan realisasi 2025 dikarenakan masih menggunakan realisasi tahun 2024. Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.22

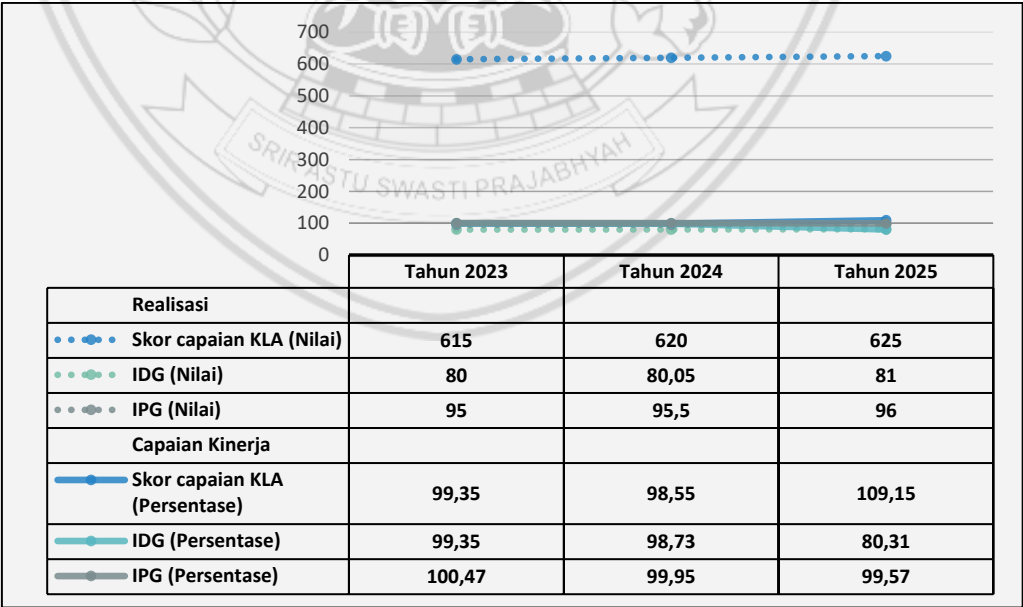
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2025



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**
- Realisasi sasaran kinerja kinerja Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dari tahun 2025 belum dapat tercapai 100% bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian 2025 mengalami penurunan masih terdapat 2 indikator yang belum bisa tercapai. Data capain IDG dan IPG masih menggunakan realisasi tahun 2024 dikarenakan tahun 2025 belum rilis.

Grafik 3.23

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2023-2025

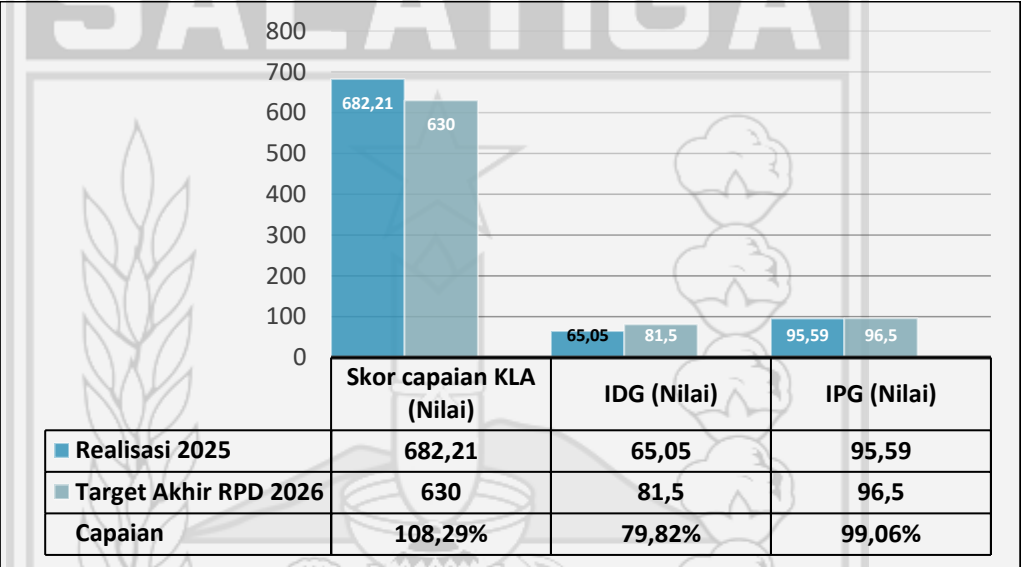




c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Realisasi sasaran kinerja Meningkatkan perlindungan pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tahun 2025 ditahun ketiga RPD ini 1 indikator kinerja sudah tercapai dari target akhir RPD 2026 sedangkan 2 indikator belum memenuhi target akhir yang ditetapkan.

**Grafik 3.24**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-**  
**Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender**  
**Tahun 2025**



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2025 sebesar 682, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian skor capaian KLA tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dilingkungan Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data kota layak anak serta peran aktif rumanksa sebagai forum anak Kota Salatiga dalam kegiatan yang diadakan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kota layak anak yaitu:

- 1) Advokasi pendidik sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah
- 2) Penanganan kasus kekerasan pada anak
- 3) Orientasi system perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan dan kecamatan
- 4) Lokakarya disiplin positif menuju sekolah ramah anak (SRA)
- 5) Pembentukan rumah ibadah anak



- 6) Pembentukan forum anak sampai ke tingkat kelurahan
- 7) Pembentukan kelurahan layak anak
- 8) Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga
- 9) Kerjasama dengan kemenag untuk pembentukan pondok pesantren layak anak

Adapun kegagalan pada IPG disebabkan antara lain:

- 1. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif masih rendah 2/25
- 2. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja baru mencapai 40,72%

Solusi untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 antara lain dengan Upaya peningkatan pendapatan bagi perempuan Kota Salatiga dengan dukungan anggaran 2026 sebesar 25.000.000 per kelompok

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesenjangan dan Keadilan Gender**

| Indikator Kinerja                                                                               | Program                                           | Anggaran    |             |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
|                                                                                                 |                                                   | Anggaran    | Realisasi   | Capaian |                   |
| Meningkatkan perlindungan pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender | Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | 170.111.800 | 163.297.800 | 95,99   |                   |
|                                                                                                 | Perlindungan perempuan                            | 248.691.000 | 158.542.869 | 63,75   |                   |
|                                                                                                 | Peningkatan kualitas keluarga                     | 518.138.000 | 490.942.670 | 94,75   |                   |
|                                                                                                 | Pengelolaan sistem data gender dan anak           | 0           | 0           | 0       |                   |
|                                                                                                 | Pemenuhan hak anak                                | 228.452.500 | 227.774.514 | 99,70   |                   |
|                                                                                                 | Perlindungan khusus anak                          | 339.199.000 | 283.066.052 | 83,45   |                   |
|                                                                                                 |                                                   |             |             |         |                   |

Sumber : Data yang diolah

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender antara lain:

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
  - 1) Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran kegiatan pelembaaan pemenuhan hak anak pada Lembaga



Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

- 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

## 9. Sasaran Strategis IX: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 9 (sembilan) adalah Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan public dan tatakelola pemerintahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
3. Indeks Kematangan organisasi Daerah;
4. Indeks PMPRB;
5. Nilai SAKIP;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Sekretariat Daerah**

6. Indeks Inovasi;
7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
8. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

9. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

10. Indeks Profesionalitas ASN
11. Nilai system Merit

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

12. QA SPIP
13. QA IEPK (indeks efektifitas pengendalian korupsi)
14. QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)
15. Kapabilitas APIP

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

### ➤ **Inspektorat Daerah**



16. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional  
Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

17. Indeks SPBE

18. Persentase ketersediaan data statistik sektoral

19. Tingkat keterbukaan informasi publik

20. Tingkat Pengamanan informasi daerah

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Komunikasi dan Informatika**

21. Persentase cakupan akta kelahiran (0-18<sup>th</sup>)

22. Persentase penduduk ber KTP elektronik

23. Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki KIA

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

24. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat

25. Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2

26. Persentase realisasi usulan hasil musrenbang

27. Persentase PKK aktif

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Kecamatan**

28. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

➤ **Sekretariat DPRD**

### 9.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas yang termuat di dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.18  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis  
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

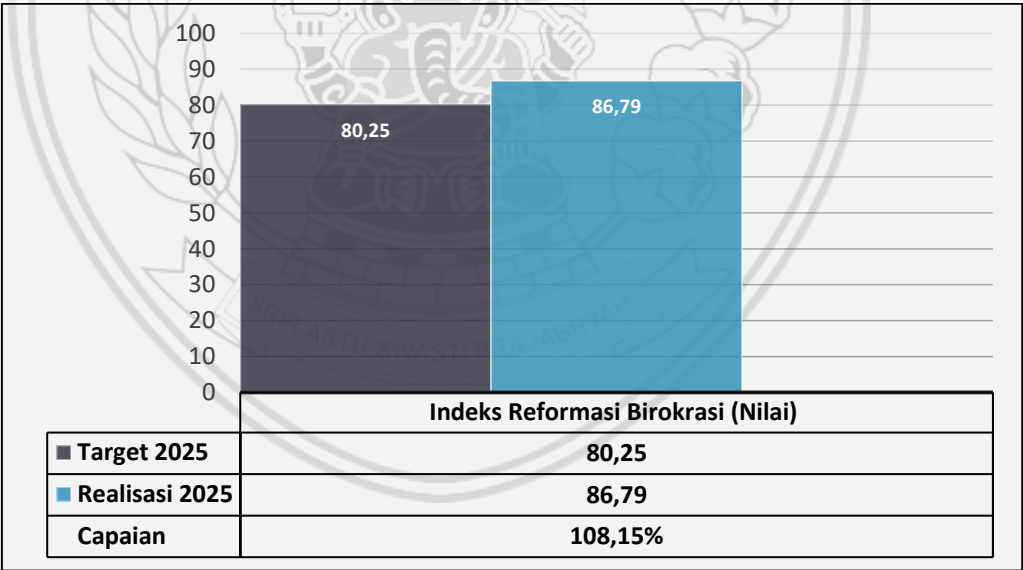
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                        |        |            |            |            |                       |
| Indeks Reformasi Birokrasi    | Nilai  | 65,50      | 67,00      | 80,25      | 70,00                 |
| Realisasi                     |        |            |            |            |                       |
| Indeks Reformasi Birokrasi    | Nilai  | 64,93      | 80,21      | 86,79*     | -                     |
| Capaian Kinerja               |        |            |            |            |                       |
| Indeks Reformasi Birokrasi    | %      | 99,13      | 119,7      | 108,15     | -                     |
| Kategori                      |        | Baik       |            |            |                       |

Sumber : Kemenpan RB

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

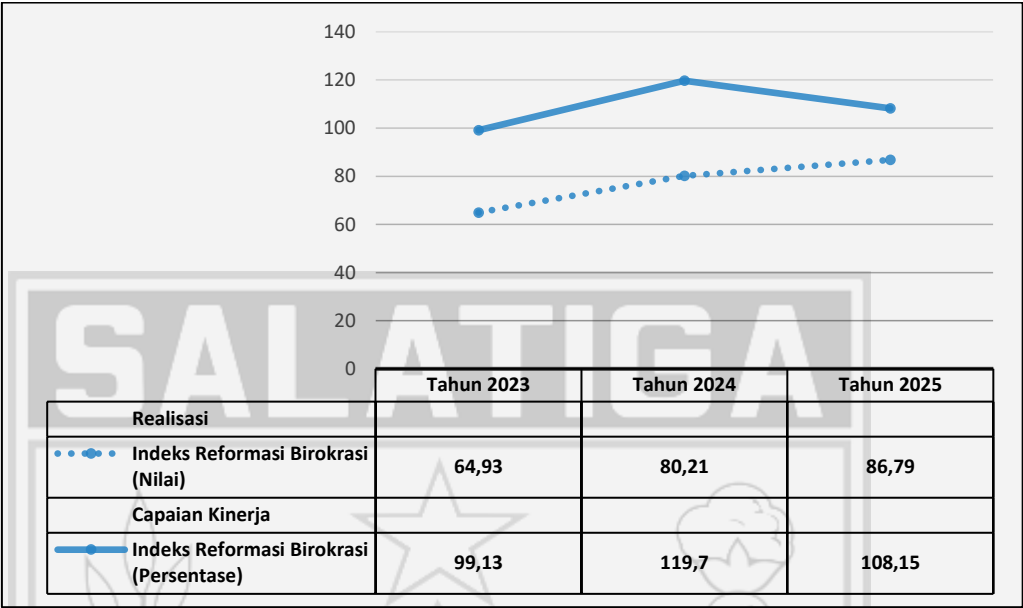
- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 80,25 sedangkan realisasi sebesar 86,79\* sehingga capaian kinerja adalah 108,15% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi masih bersifat sementara, dikarenakan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih belum dikeluarkan oleh KemenpanRB.

Grafik 3.25  
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025



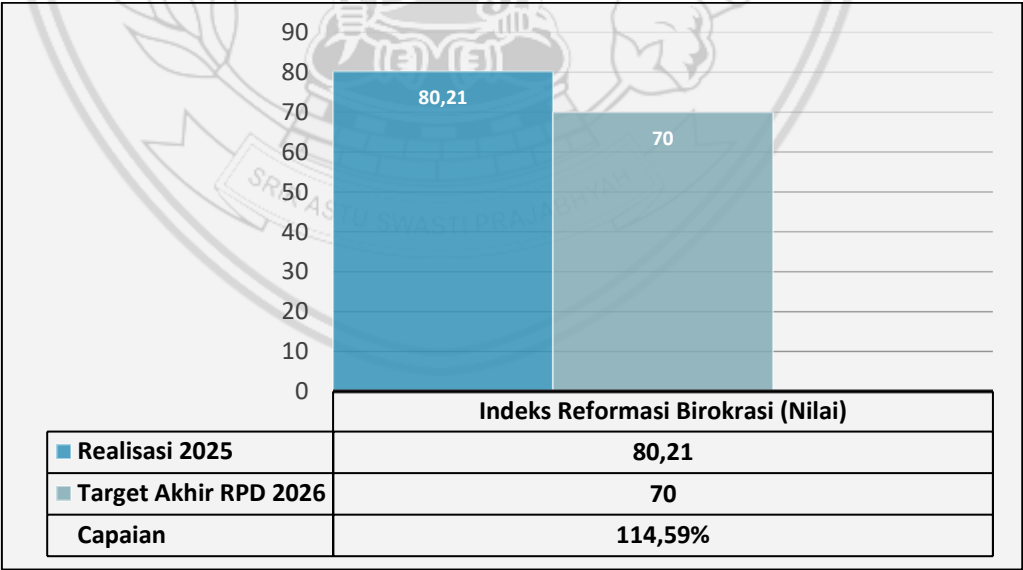
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya**  
Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 adalah 80,21 dan capaian kinerjanya adalah 99,95%. Maka apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 80,21, 2023 sebesar 66,00 dan tahun 2022 sebesar 66,85 realisasi Indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024. Data dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.26  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah  
Daerah Tahun 2023-2025



- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**  
Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 adalah 80,21 sedangkan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 70,00 dengan demikian target akhir Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2025 ini sudah melebihi target pada akhir RPD.

Grafik 3.27  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah  
Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Daerah Tahun 2025



- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**  
Tidak ada standar nasional untuk Indeks Reformasi Birokrasi.



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan indikator Indek Reformasi Birokrasi dikarenakan:

- 1) Koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi
- 2) Menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB.
- 3) Meningkatkan capain per indikator dengan Kerjasama dengan semua pihak terkait.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja Reformasi Birokrasi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.19  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

| Indikator Sasaran                                              | Program                                               | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                |                                                       | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Administrasi umum                                     |               |               |         |                   |
|                                                                | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                 | 1.664.441.300 | 1.501.026.559 | 90,18   |                   |
|                                                                | Perekonomian dan Pembangunan                          | 901.323.800   | 433.297.208   | 48,07   |                   |
|                                                                | Aplikasi Informatika                                  | 4.584.976.004 | 4.335.394.889 | 94,55   |                   |
|                                                                | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik           | 610.587.100   | 545.418.956   | 89,32   |                   |
|                                                                | Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 156.408.600   | 122.639.100   | 78,40   |                   |
|                                                                | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 128.022.000   | 118.525.000   | 92,58   |                   |
|                                                                | Pendaftaran Penduduk                                  | 1.046.096.000 | 831.402.081   | 79,48   |                   |
|                                                                | Pencatatan Sipil                                      | 320.954.300   | 303.566.966   | 94,58   |                   |
|                                                                | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       | 42.374.000    | 39.780.287    | 93,88   |                   |
|                                                                | Kepegawaian Daerah                                    | 945.691.280   | 756.934.489   | 80,04   |                   |
|                                                                | Pengembangan Sumber Daya Manusia                      | 2.813.141.853 | 2.664.988.719 | 94,73   |                   |
|                                                                | Penyelenggaraan Pengawasan                            | 229.096.900   | 27.428.000    | 11,97   |                   |
|                                                                | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi       | 876.549.000   | 493.472.000   | 56,30   |                   |
|                                                                | Pengelolaan Keuangan Daerah                           | 3.510.053.800 | 2.113.642.650 | 60,22   |                   |
|                                                                | Perencanaan, Pengendalian                             | 1.053.383.100 | 702.184.150   | 66,66   |                   |



| Indikator<br>Sasaran | Program                                                                | Anggaran       |                |         | Tingkat<br>Efisiensi |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
|                      |                                                                        | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                      |
|                      | dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah                                  |                |                |         |                      |
|                      | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | 2.018.246.900  | 1.805.351.021  | 89,45   |                      |
|                      | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah                               | 235.338.500    | 130.325.800    | 55,38   |                      |
|                      | Pengelolaan<br>Arsip                                                   | 403.346.405    | 382.948.260    | 94,94   |                      |
|                      | Perlindungan<br>dan<br>Penyelamatan<br>Arsip                           | 11.362.000     | 9.005.200      | 79,26   |                      |
|                      | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan<br>Fungsi DPRD                    | 20.345.792.650 | 17.247.051.350 | 84,77   |                      |
|                      | Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik             | 126.416.000    | 119.061.639    | 94,18   |                      |
|                      | Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan                       | 740.918.500    | 705.400.888    | 95,21   |                      |
|                      | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                      | 170.300.000    | 147.077.155    | 86,36   |                      |
|                      | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                    | 502.421.717    | 442.872.678    | 88,15   |                      |

Sumber : Data yang diolah

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain:

- **Sekretariat Daerah**
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan kegiatan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; penataan organisasi; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.
  - 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.



- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.
- **Dinas Komunikasi dan Informatika**
  1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
  2. Program Aplikasi Informatika dengan sasaran kegiatan pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah.
  3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup daerah.
  4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
  - 1) Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penataan pendaftaran penduduk.
  - 2) Program Pencatatan Sipil dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
  - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.
- **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
  - 1) Program Kepegawaian Daerah dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
  - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
- **Inspektorat Daerah**
  - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
  - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi.



- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**
  - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
  - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
  - 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.
- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
  - 1) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
  - 2) Program Pengelolaan Arsip dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.
- **Sekretariat DPRD**
  - 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD.
- **Kecamatan**
  - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.



- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

**10. Sasaran Strategis X: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan**

Sasaran Strategis Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja Utama (IKU).

**10.1 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota**

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Penanganan Ketentraman Kota adalah Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Wilayah yang Kondusif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang Diselsaikan
- b. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Satuan Polisi Pamong Praja**

Cakupan Penanganan Ketentraman Kota merujuk pada berbagai strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kota tetap aman, damai, dan stabil.

Pengukuran nilai Cakupan Penanganan Ketentraman Kota dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan formulasi sebagai berikut :

*Cakupan Penanganan Ketentraman Kota*

$$= \frac{\text{jumlah patroli} \times 3 \text{ dalam sehari}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

**10.2 Penanggulangan Potensi Konflik**

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanggulangan Potensi Konflik adalah:

- a. Menurunnya Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- b. Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tentram, Damai dan Harmonis yang Dilandasi Rasa Saling Menghargai dan Menghormati Perbedaan Baik Social, Budaya Maupun Pandangan Politik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Penanggulangan Potensi Konflik melibatkan serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk mencegah timbulnya konflik atau mengelola konflik yang ada sehingga tidak berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan.

Pengukuran dan pengolahan data Penanggulangan Potensi Konflik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan formulasi sebagai berikut :

*Penanggulangan Potensi Konflik*  
$$= \frac{\text{Jumlah konflik yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$$

10.3Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana adalah Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Kelurahan Tangguh Bencana
- b. Indeks Risiko Bencana

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah didapatkan melalui penjumlahan nilai prioritas dari 7 indikator utama dalam tools IKD.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan.

Tabel 3.20  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                  | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                                         |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Penanganan Ketentraman Kota            | %      | 100        | 100        | 100        | 100                   |
| Penanggulangan Potensi Konflik                 | %      | 100        | 100        | 100        | 100                   |
| Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana | Nilai  | 3,84       | 3,86       | 0,58       | 3,9                   |
| Realisasi                                      |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Penanganan Ketentraman Kota            | %      | 100        | 100        | 100        | -                     |
| Penanggulangan Potensi Konflik                 | %      | 100        | 100        | 87,5       |                       |
| Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana | Nilai  | 5,6        | 3,46       | 0,52       | -                     |

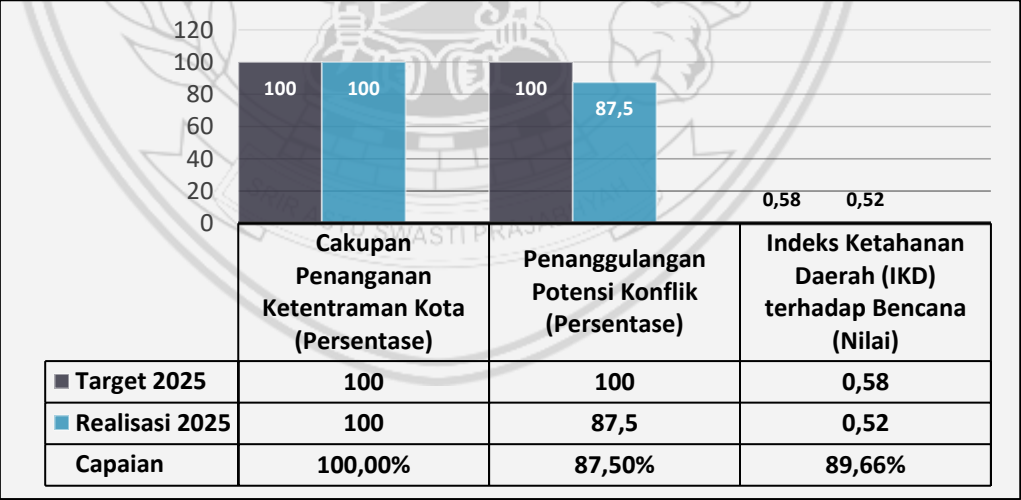
| Indikator Kinerja Utama (IKU)                  | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Capaian Kinerja                                |        |            |            |            |                       |
| Cakupan Penanganan Ketentraman Kota            | %      | 100        | 100        | 100        | -                     |
| Penanggulangan Potensi Konflik                 | %      | 100        | 100        | 87,50      |                       |
| Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana | %      | 145,83     | 89,64      | 89,66      | -                     |
| Kategori                                       |        | Baik       |            |            |                       |

Sumber : Satpol PP

Indikator Sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Tahun 2025 untuk Indeks Ketahanan Daerah menggunakan target BPBP dimana ada perbedaan target antara renstra dengan target BNPB. Selengkapnya analisa terhadap capaian Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target Sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan pada tahun 2025, 2 indikator bisa tercapai 100% sedangkan 1 indikator tercapai sebesar 87,5% Adapun data bisa dilihat pada grafik berikut.

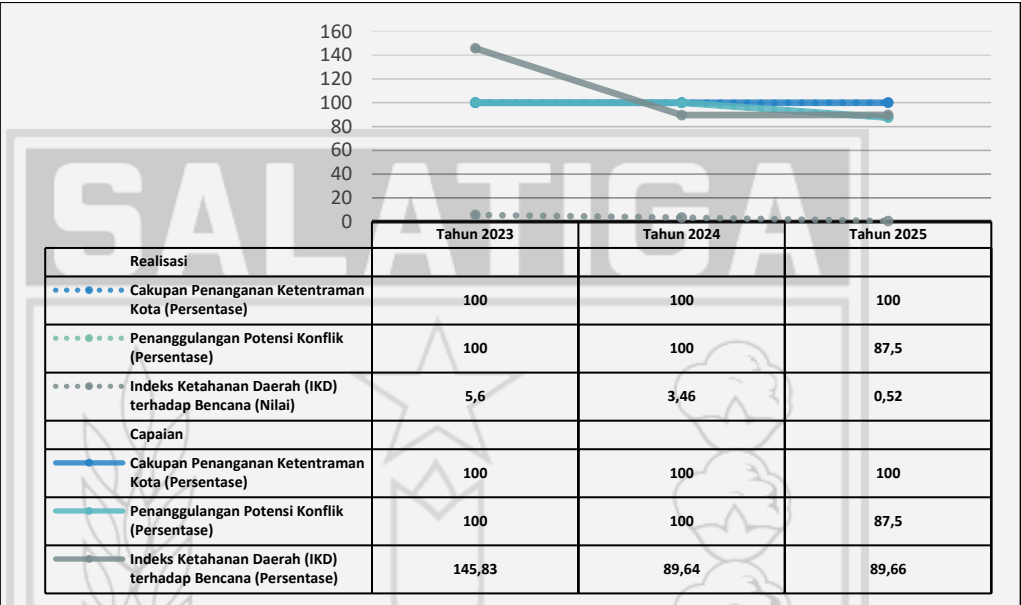
**Grafik 3.28**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Tahun 2025**



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi Sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2025 terdapat 2 indikator yang realisasinya mencapai 100% dan 1 indikator tercapai 87,5% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 ada 1 indikator yang realisasinya

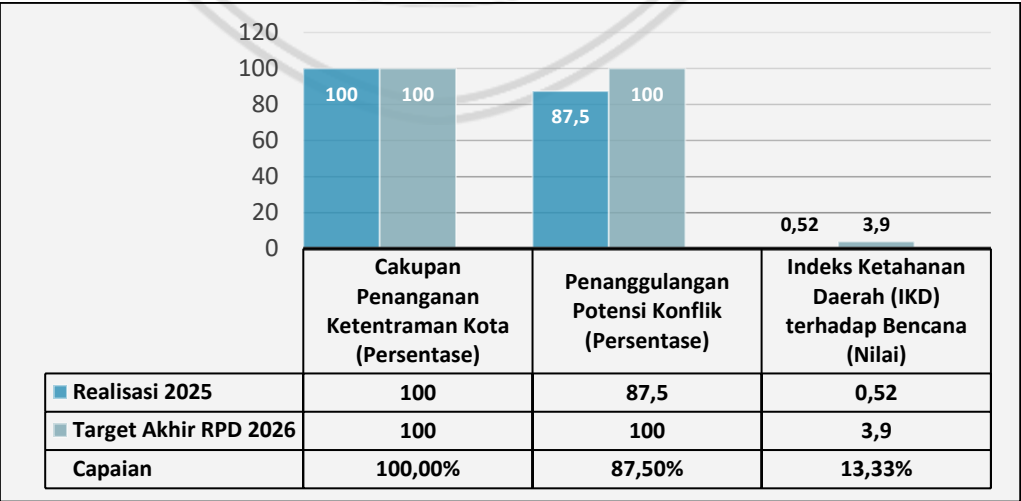
menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dapat dilihat dari grafik berikut.

**Grafik 3.29**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Menciptakan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Tentram,**  
**Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Tahun**  
**2023-2025**



- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**  
Realisasi sasaran Menciptakan tatahan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2025 ini sudah terdapat 2 indikator yang sudah memnuhi target 100% dari yang ditargetkan dan terdapat 1 indikator yang belum tercapai. Dapat dilihat dari grafik berikut.

**Grafik 3.30**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**  
**Sasaran Strategis Menciptakan Tatahan Kehidupan Masyarakat**  
**yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas**  
**Pembangunan Tahun 2025**





d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk indikator ini.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisi penyebab kegagalan pada sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan :

**Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana**

- 1. Terkendala legalisasi 2 dokumen kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana.
- 2. Minimnya anggaran untuk mendukung tercapaian indikator
- 3. SDM yang memiliki kompetensi dibidang mitigasi bencana sangat minim

Upaya perbaikan kedepan:

- 1. Dokumen kajian resiko bencana sudah revisi tahap akhir hasil asistensi dengan BNPD dan tahun 2026 akan diajukan keputusan Wali Kota
- 2. Dokumen RPB tahun 2026 tahap pembahsan dengan bagian hukum untuk disusun Parturan wali Kota.
- 3. Pelatihan mandiri bagi aparatur terkait mitigasi bencana
- 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3, peningkatan intensitas kinerja penegak perda dan peningkatan peran serta fungsi PPNS.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.21**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan**

| Sasarann Kinerja                                                                                              | Program                                                                                                                        | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan | Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                    | 2.063.468.000 | 1.895.125.450 | 91,84   |                   |
|                                                                                                               | Pencegahan, penanggulanga, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran                                               | 195.000.000   | 163.220.600   | 83,70   |                   |
|                                                                                                               | Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                          | 1.479.442.000 | 1.472.070.100 | 99,50   |                   |
|                                                                                                               | Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                                           | 701.754.500   | 670.379.675   | 95,52   |                   |
|                                                                                                               | Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 812.309.016   | 797.597.816   | 98,19   |                   |



| Sasarann Kinerja | Program                                                                                            | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                  |                                                                                                    | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
|                  | Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya                                    | 196.916.115   | 183.787.400   | 93,33   |                   |
|                  | Penanggulangan Bencana                                                                             | 1.586.560.732 | 1.399.699.550 |         |                   |
|                  | Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas peningkatan konflik sosial | 794.970.600   | 683.605.070   | 86      |                   |

Sumber : Data yang diolah

**h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator kinerja, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain:

- **Satuan Polisi Pamong Praja**
  - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat; penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

**11. Sasaran Strategis XI: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata adalah:

1. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik.
2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini adalah:

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**11.1 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik**

Kawasan wajah kota yang tertata merujuk pada bagian-bagian kota yang memiliki infrastruktur yang baik, tata ruang yang teratur, serta estetika yang menarik.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

*Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik*  
$$= \frac{\text{Ruas/lokasi terbagun}}{\text{Target ruas/lokasi penataan wajah kota}} \times 100\%$$

Tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata sebagai berikut.

**Tabel 3.22**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam**  
**Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata**

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                          | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Target</b>                                          |        |            |            |            |                       |
| Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik | %      | 52,5       | 55         | 61,8       | 60                    |
| <b>Realisasi</b>                                       |        |            |            |            |                       |
| Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik | %      | 58,82      | 61,45      | 61,8       | -                     |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                 |        |            |            |            |                       |
| Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik | %      | 112,04     | 108,95     | 100        | -                     |

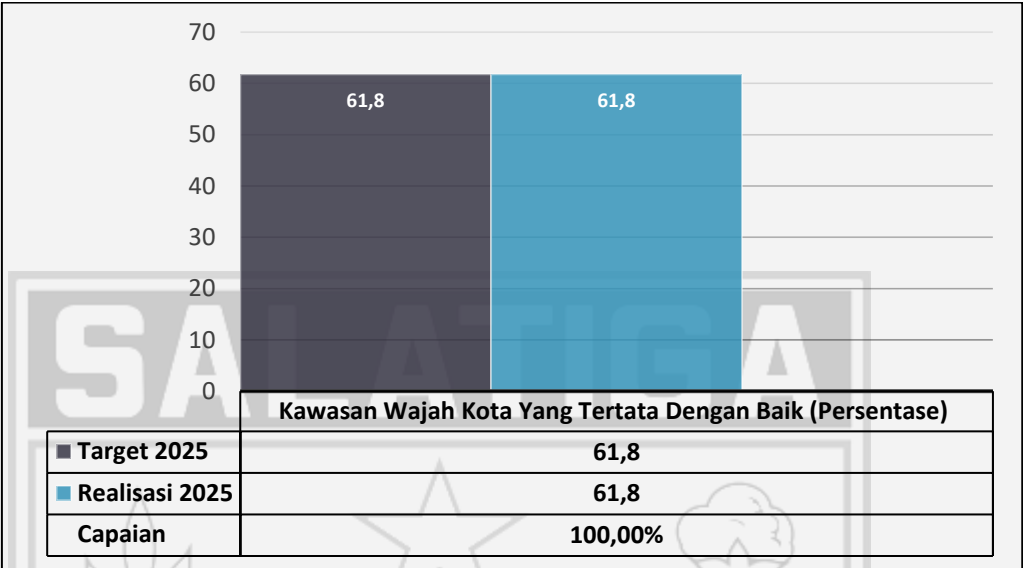
Sumber : DPUPR

Sasaran kinerja meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata. Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator kinerja Utama meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2025 adalah 61,8% dan terealisasi sebesar 61,8% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan Baik.

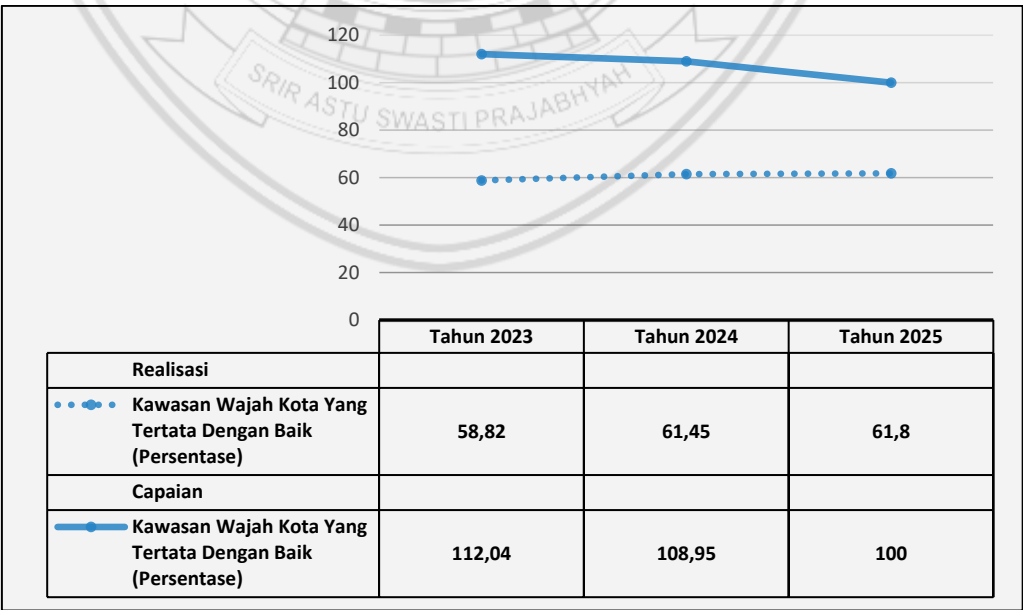


**Grafik 3.31**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2025**



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2025 sebesar 61,8% dan capainya sebesar 107,5% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 50% dan realisasi tahun 2023 sebesar 58,82% dan tahun 2024 61,45%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Grafik 3.32**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2023-2025**

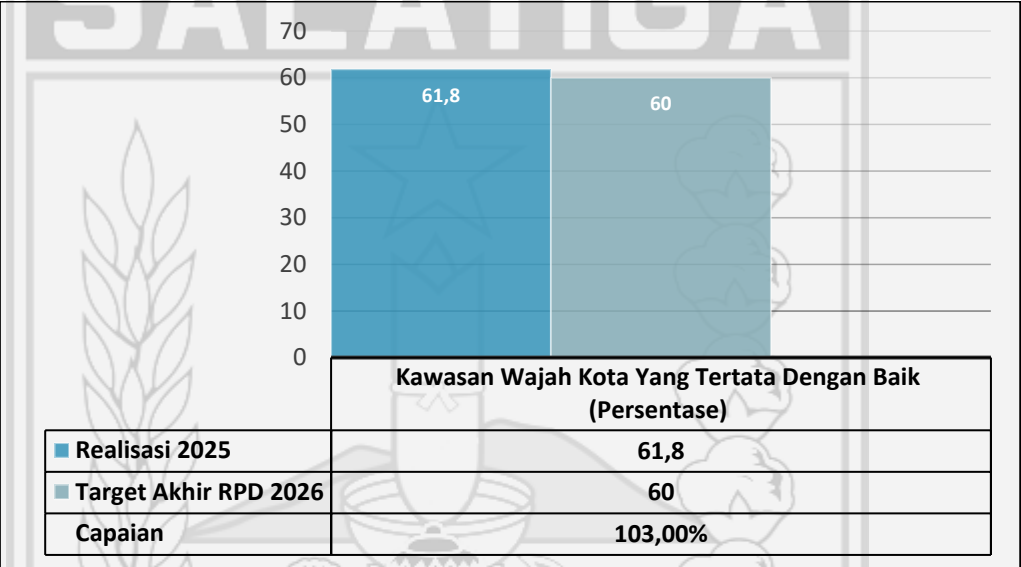




c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**

Realisasi kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2025 sebesar 61,8% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 60%, yang berarti pada tahun 2025 sudah melebihi target yang ditentukan.

**Grafik 3.33**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata Tahun 2025**



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab tercapainya indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik antara lain:

1. Ketersediaan anggaran, dukungan masyarakat sekitar lokasi pekerja, dukungan pecinta lingkungan juga mendukung tercapaian target presentase kawasa wajah kota yang tertata dengan baik.
2. Membangun, memelihara dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum.
3. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkunganya dan memfasilitasi tenga/usaha jasa kontruksi menjadi tenaga trampil bersertifikat dan paham aturan jasa kontruksi.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.



**Tabel 3.23**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja**  
**Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam**  
**Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata**

| Sasaran Kinerja                                                                                          | Program                                                  | Anggaran       |                |         | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                                                                                                          |                                                          | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                   |
| Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2.046.711.500  | 1.966.287.306  | 96,03   |                   |
|                                                                                                          | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 5.725.974.000  | 5.617.595.523  | 98,11   |                   |
|                                                                                                          | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | 19.163.814.000 | 17.405.888.240 | 90,83   |                   |
|                                                                                                          | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | 5.212.678.000  | 4.276.038.654  | 82,03   |                   |
|                                                                                                          | Penyelenggaraan Jalan                                    | 29.113.370.000 | 27.227.145.478 | 93,52   |                   |
|                                                                                                          | Penataan Bangunan Gedung                                 | 617.370.000    | 595.827.000    | 96,51   |                   |
|                                                                                                          | Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      | 11.396.250.000 | 9.634.476.622  | 84,54   |                   |
|                                                                                                          | Pengembangan Jasa Kontruksi                              | 112.409.173    | 32.809.150     | 28,94   |                   |
|                                                                                                          | Penyelenggaraan Penataan Ruang                           | 626.928.925    | 397.809.150    | 63,45   |                   |
|                                                                                                          |                                                          |                |                |         |                   |

Sumber : Data yang diolah

**g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya pencapaian target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik, terdapat beberapa program yang mendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota.
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan



- dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF.
  - 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
  - 8) Program Pengembangan Jasa Kontruksi dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional.
  - 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada kegiatan penataan ruang dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

## 12. Sasaran Strategis XII: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

### 12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas udara
- Indeks Kualitas Lahan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Dinas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan formulasi sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

### 12.2 Rasio Konektivitas Kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Kota adalah meningkatnya

keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Rasio Ijin Trayek
- Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Dinas Perhubungan**

Rasio Konektivitas Kota adalah sebuah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sebuah kota terkoneksi baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur transportasi, aksesibilitas, dan layanan publik yang tersedia bagi penduduk. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Rasio Konektivitas Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

*Rasio Konektivitas Kota*  
$$= \frac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}} \times 100\%$$

12.3Kinerja Lalu Lintas Kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Lalu Lintas Kota adalah Rasio meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase Kepemilikan KIR Angkatan Umum.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah **Dinas Perhubungan**

Kinerja lalu lintas kota mencerminkan seberapa efisien dan lancarnya mobilitas kendaraan dan orang pada kota tersebut. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Kinerja Lalu Lintas Kota dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota} = \frac{V/C \text{ Rasio Ruas Jalan}}{\text{Jumlah Jalan yang Disurvei}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan adalah:

Tabel 3.24  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

| Indikator Kinerja (IKU)          | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Target                           |        |            |            |            |                       |
| Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup | Nilai  | 56,2       | 56,4       | 69,93      | 69,98                 |
| Rasio Konektivitas Kota          | %      | 0,71       | 0,71       | 0,88       | 0,71                  |



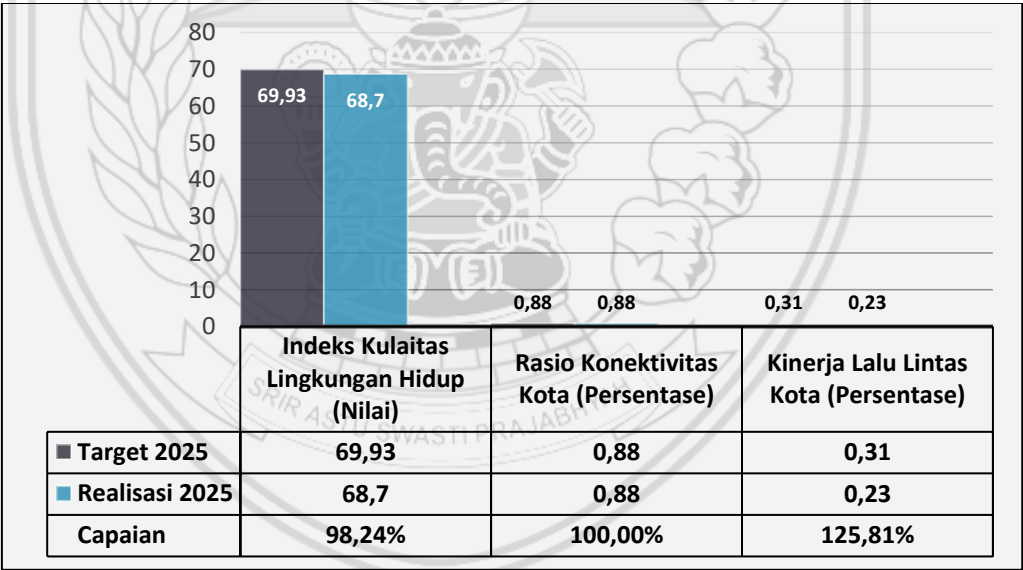
| Indikator Kinerja (IKU)          | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Kinerja Lalu Lintas Kota         | %      | 0,35       | 0,4        | 0,31       | 0,5                   |
| Realisasi                        |        |            |            |            |                       |
| Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup | Nilai  | 58,37      | 61,45      | 68,70      | -                     |
| Rasio Konektivitas Kota          | %      | 0,81       | 0,81       | 0,88       | -                     |
| Kinerja Lalu Lintas Kota         | %      | 0,39       | 0,4        | 0,23       |                       |
| Capaian Kinerja                  |        |            |            |            |                       |
| Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup | %      | 103,86     | 108,95     | 98,24      | -                     |
| Rasio Konektivitas Kota          | %      | 114,08     | 114,08     | 100,00     | -                     |
| Kinerja Lalu Lintas Kota         | %      | 88,57      | 100,00     | 134,81     | -                     |

Sumber : Dinas LH dan Dinas Perhubungan

Selengkapnya analisa terhadap capaian Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2025 dari 3 indikator kinerja dapat terealisasi 100% dari target yang ditentukan. Dapat dilihat dari grafik berikut.

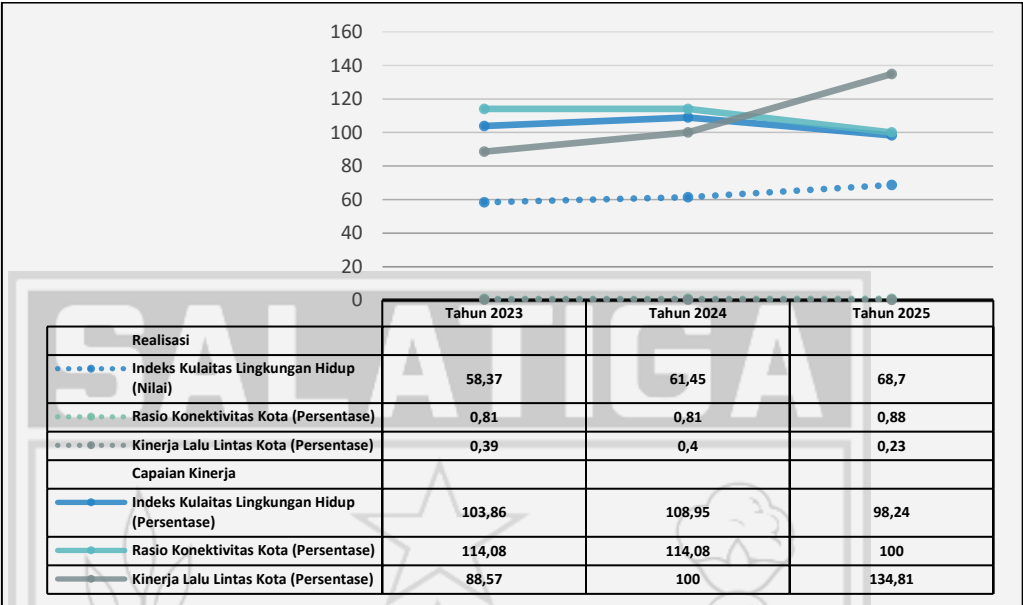
**Grafik 3.34**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025**



- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**  
Realisasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan, Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.35

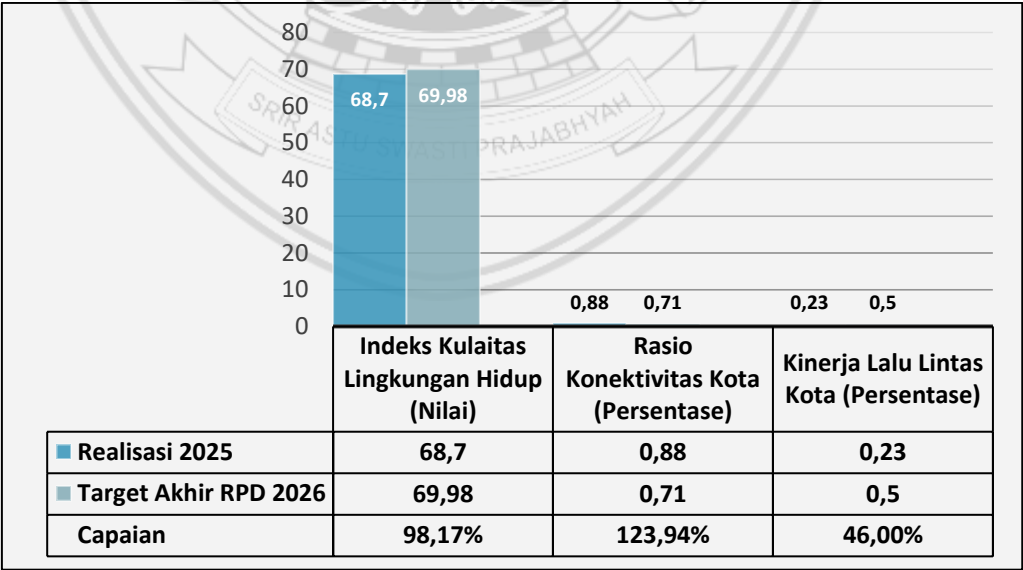
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2025



- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
- Realisasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 3 idikator kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 ditahun 2024 ini sudah terdapat 2 indikator yang tercapai sedangkan 1 indikator belum tercapai ditahun kedua ini, dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 3.36

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025



- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**



Target nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,49 sedangkan realisasi kinerja IKLH Kota salatiga tahun 2025 sebesar 68,70% sehingga realisasi IKLH kota Salatiga masih di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menyebabkan keberhasilan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu terdapat peningkatan kualitas air (IKA), dan kualitas tutupan lahan (IKL) di kota Salatiga.Peningkatan kualitas tersebut diperoleh dengan meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga dalam hal pembinaan, pengawasan ketaatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan hidup, peningkatan tutupan lahan(ruang terbuka hijau) dan program kegiatan lainya yang mendukung. Masyarakat dan swasta memiliki peran penting dengan cara ikut peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.25  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

| Indikator Kinerja                                                                | Program                                                                                             | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                                                                                  |                                                                                                     | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                   |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                        | 34.750.000    | 28.838.250    | 82,99   |                   |
|                                                                                  | Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                         | 883.751.720   | 314.683.131   | 35,61   |                   |
|                                                                                  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                          | 3.932.809.882 | 3.689.828.527 | 93,82   |                   |
|                                                                                  | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)    | 46.530.000    | 5.974.770     | 12,84   |                   |
|                                                                                  | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH) | 29.000.200    | 22.066.320    | 76,09   |                   |
|                                                                                  | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Untuk Masyarakat                                   | 142.908.800   | 40.663.800    | 28,45   |                   |
|                                                                                  |                                                                                                     |               |               |         |                   |



| Indikator Kinerja | Program                                               | Anggaran       |                |         | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                   |                                                       | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                   |
|                   | Pengelolaan Persampahan                               | 4.036.815.225  | 3.425.027.524  | 84,84   |                   |
|                   | Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 14.329.919.560 | 13.970.586.276 | 97,49   |                   |

Sumber : Data yang diolah

**g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain sebagai berikut:

- **Dinas Lingkungan Hidup**
  - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.
  - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
  - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah (B3).
  - 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah.
  - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
  - 7) Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**13. Sasaran Strategis XIII: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup**

Sasaran strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU):



13.1 Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU adalah Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Persentase rumah yang didukung oleh PSU (Penyediaan Sistem Utilitas) mengacu pada proporsi rumah atau bangunan di suatu kawasan yang menerima layanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dari penyedia layanan utilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

**Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU**

$$= \frac{\text{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah di Kota Salatiga}} \times 100\%$$

13.2 Pemukiman Yang Tertata

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemukiman Yang Tertata adalah :

- a. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase lingkungan permukiman kumuh.
- b. Meningkatnya pengelolaan pertanahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyesalan kasus tanah negara.

Pemukiman yang tertata merujuk pada suatu wilayah permukiman yang direncanakan dan diatur secara terorganisir dengan infrastruktur yang baik serta pemisahan fungsi lahan yang jelas. Indikator ini sering digunakan dalam konteks perencanaan perkotaan untuk menggambarkan suatu kawasan yang memiliki tata ruang yang teratur dan memadai.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pemukiman yang Tertata dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

**Pemukiman yang Tertata**

$$= \frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \times 100\%$$

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup adalah **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**



Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup.

**Tabel 3.26**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup**

| Indikator Kinerja Utama (IKU)           | Satuan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target Akhir RPD 2026 |
|-----------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Target</b>                           |        |            |            |            |                       |
| Persentase rumah yang didukung oleh PSU | %      | 10,2       | 10,37      | 13         | 11                    |
| Pemukiman yang tertata                  | %      | 6,26       | 6,34       | 6,62       | 6,49                  |
| <b>Realisasi</b>                        |        |            |            |            |                       |
| Persentase rumah yang didukung oleh PSU | %      | 12,47      | 12,9       | 13,59      | -                     |
| Pemukiman yang tertata                  | %      | 6,34       | 6,42       | 6,87       | -                     |
| <b>Capaian Kinerja</b>                  |        |            |            |            |                       |
| Persentase rumah yang didukung oleh PSU | %      | 122,25     | 124,40     | 104,54     | -                     |
| Pemukiman yang tertata                  | %      | 101,28     | 104,42     | 103,78     | -                     |

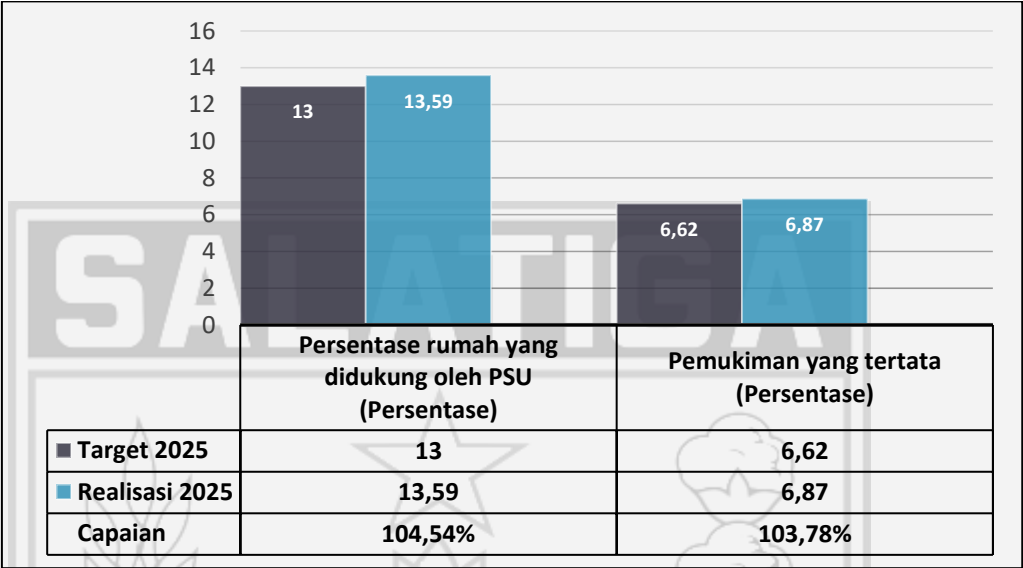
Sumber : Dinas PKP

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran Strategis Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**  
Target Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2025 dari 2 indikatif kinerja dapat tercapai 100% dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya dengan kategori Sangat Baik.

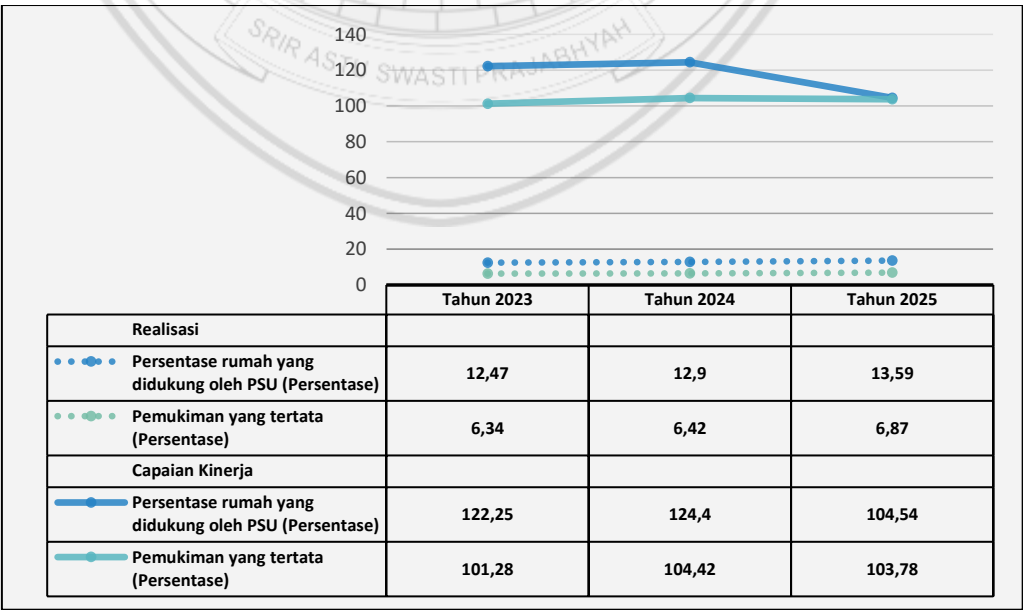


**Grafik 3.37**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2025**



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**  
Realisasi sasaran kinerja Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2025 dari 2 indikator kinerja mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024, dapat dilihat dari grafik berikut.

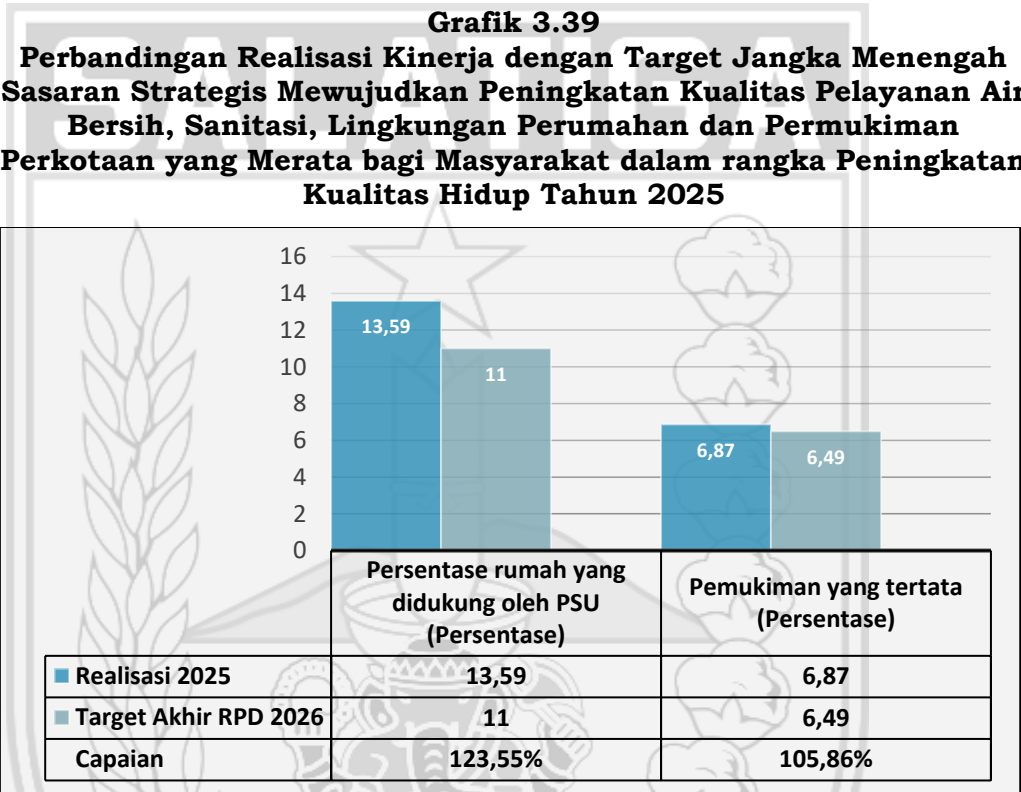
**Grafik 3.38**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2023-2025**





c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)**

Realisasi sasaran kinerja Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2025 dari 2 indikator kinerja sudah dapat tercapai ditahun kedua ini dari target RPD 2026, Adapun data dapat dilihat pada grafik berikut.



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk Indikator ini

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan kinerja Persentase rumah yang didukung oleh PSU ini diantaranya dengan Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan serta penyediaan infrastruktur yang sesuai

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut.



**Tabel 3.27**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup**

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 | Program                                               | Anggaran       |                |         | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                       | Anggaran       | Realisasi      | Capaian |                   |
| Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                   | 12.506.000     | 0              | 0       |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Pengelolaan Izin Membuka Tanah                        | 185.829.200    | 176.400.800    | 94,93   |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Penatagunaan Tanah                                    | 1.775.074.425  | 1.370.785.444  | 77,22   |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Pengembangan Perumahan                                | 889.372.540    | 680.772.609    | 76,55   |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Kawasan Permukiman                                    | 17.715.295.000 | 16.506.464.952 | 93,18   |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 4.111.154.857  | 3.990.565.756  | 90,07   |                   |

Sumber : Data yang diolah

**g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya persentase rumah yang didukung oleh PSU, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- 2) Program Kawasan Permukiman yang diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan sasaran kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.
- 4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan sasaran kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.
- 5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk menunjang fungsi hunian umum perumahan.



## B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang didasarkan atas prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah.

Sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, disusun dengan pendekatan kinerja dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Usulan program kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program. Penilaian kewajaran dan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilihat dari pelaksanaan program yang sudah diselesaikan oleh perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dalam capaian kinerja yang direncanakan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.040.303.335.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.056.413.528.549,- atau 101,54%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang



dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan tahun 2025 mencapai Rp349.238.343.628,- atau 104,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp333.657.921.500,-. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp313.963.681.492,- maka realisasi tahun 2025 naik sebesar Rp35.274.662.134,- atau 11,24%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.28**  
**Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2013- 2025**

| Tahun | Target PAD      | Realisasi PAD   | Pendapatan Daerah (Realisasi) | Proporsi % |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 2013  | 87.723.650.000  | 106.100.450.499 | 603.204.201.915               | 17,59      |
| 2014  | 114.781.747.000 | 165.747.645.080 | 727.619.868.812               | 22,78      |
| 2015  | 143.835.170.000 | 167.010.555.173 | 673.865.039.498               | 24,78      |
| 2016  | 172.775.326.000 | 203.768.652.017 | 879.784.189.262               | 23,16      |
| 2017  | 188.391.649.000 | 218.453.587.980 | 880.956.308.959               | 24.80      |
| 2018  | 209.772.712.000 | 208.926.057.032 | 889.992.411.250               | 23,48      |
| 2019  | 221.089.796.000 | 236.086.218.372 | 928.019.899.150               | 25,44      |
| 2020  | 197.768.282.000 | 219.553.318.240 | 890.223.683.933               | 24,66      |
| 2021  | 237.406.216.000 | 280.701.251.597 | 946.191.087.524               | 29,67      |
| 2022  | 218.644.038.938 | 240.959.878.632 | 918.353.779.916               | 26,24      |
| 2023  | 250.852.619.000 | 284.536.299.558 | 987.241.298.498               | 28,82      |
| 2024  | 290.801.610.561 | 313.963.681.492 | 1.038.143.488.453             | 30,24      |
| 2025  | 333.657.921.500 | 349.238.343.626 | 1.056.413.528.549             | 33,06      |

Sumber : BPKPD (diolah)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.134.849,392.788- dan terealisasi sebesar Rp1.027.646.379.548,- atau sebesar 90,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.041.750.433.639,- maka mengalami penurunan sebesar Rp18.270.040.096,- atau sebesar 17,6%.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp94.546.057.288,- dan realisasinya sebesar Rp94.546.057.288.159.087.219,- atau mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.153.002.474,-, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.606.945.186,- atau sebesar 3,68%.

Penerimaan pembiayaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp94.546.057.288,- dan realisasinya sebesar Rp94.546.057.288,- atau 100%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar



Rp98.153.002.474,-, maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.606.945.186,00,- atau 3,7%.

Pembiayaan Netto tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp Rp94.546.057.288,- dan realisasinya sebesar Rp94.546.057.288,- atau 100%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.153.002.474,-, maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.606.945.186,00,- atau 3,7%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,- Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp123.313.206.289,- maka realisasi SILPA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,- atau 0%.





BAB IV  
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Salatiga Tahun 2025, berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025:

Tabel 4.1  
Data Capaian Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Utama                                                                                               | Target 2025  | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja | Kategori    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1  | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas       | Rata Rata Lama Sekolah                                                                                                | 11,46 Tahun  | 11,49 Tahun    | 100,3           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                           | Harapan Lama Sekolah                                                                                                  | 15,46 Tahun  | 15,47 Tahun    | 100,1           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                           | Indek Literasi Masyarakat                                                                                             | Nilai 63,14  | Nilai 63,14    | 100             | Baik        |
| 2  | Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah                                                                                           | Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan            | 44,98%       | 56,52%         | 125,7           | Sangat baik |
| 3  | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga                                                                                                                 | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                         | 16 Medali    | 76 Medali      | 475             | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                           | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 23%          | 18,53 %        | 80,6            | Baik        |
| 4  | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk                                                                           | Angka Harapan Hidup                                                                                                   | 78,30 Tahun  | 78,75 Tahun    | 101,1           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                           | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                             | 1,18%        | 1,13%          | 95,8            | Baik        |
| 5  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk                                                                                        | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                   | 5,40-6,10%   | 5,98%          | 110,8           | Sangat Baik |
|    |                                                                                                                                                           | Pendapatan per kapita                                                                                                 | 57,90 Juta   | 95,23          | 164,5           | Sangat Baik |
| 6  | Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga | Pertumbuhan nilai investasi                                                                                           | 10,40%       | 76,91%         | 736,69          | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                           | Tingkat pengangguran terbuka                                                                                          | 2,54-3,67%   | 3,67%          | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                                                           | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                                                                    | 70,85-71,62% | 70,93%         | 100,1           | Sangat baik |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Utama                                    | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja | Kategori    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| 7  | Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial                                                                               | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | 97,03%      | 97,89          | 100,9           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                                                  | Pola Pangan Harapan                                        | 96.60%      | 92,73          | 96,0            | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | Persentase Peminat Transmigrasi                            | 4,07%       | 88,89%         | 2184            | Sangat baik |
| 8  | Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender                                                                                 | Score capaian KLA                                          | 625         | 682,21         | 109,2           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                                                  | IDG                                                        | 81,00       | 79,48          | 98,2            | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | IPG                                                        | 96          | 95,45          | 99,5            | Baik        |
| 9  | Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah                                                                                                                   | Indeks Reformasi Birokrasi                                 | 80,25       | Nilai 80,21    | 99,9            | Baik        |
| 10 | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan                                                                    | Cakupan Penanganan Ketentraman Kota                        | 100%        | 100%           | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | Penanggulangan Potensi Konflik                             | 100%        | 87,5           | 87,5            | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana             | Nilai 0,58  | Nilai 0,52     | 89,7            | Baik        |
| 11 | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata                                                                         | Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik     | 61,8%       | 61,8%          | 100             | Baik        |
| 12 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan                                                                                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Nilai 69,93 | 68,70          | 98,2            | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | Rasio konektivitas kota                                    | 0,88%       | 0,88           | 100             | Baik        |
|    |                                                                                                                                                                                  | Kinerja Lalu Lintas Kota                                   | 0,31%       | 0,23           | 74,2            | Cukup       |
| 13 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Persentase rumah yang didukung oleh PSU                    | 13%         | 13,59%         | 104,5           | Sangat baik |
|    |                                                                                                                                                                                  | Pemukiman yang tertata                                     | 6,62%       | 6,87%          | 103,8           | Sangat baik |

Sumber : Data yang diolah

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2025 disimpulkan bahwa **14** (empat belas)



Indikator Kinerja Utama dikategorikan **Sangat Baik**, dan **14** (empat belas) Indikator Kinerja Utama dikategorikan **Baik** dan **1** (satu) Indikator Kinerja Utama dikategorikan **Cukup**.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.134.849.392.788,00,- dengan realisasi sebesar Rp1.027.646.379.548,00,- atau sebesar 90,55%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2025. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.





**BAGIAN ORGANISASI**  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SALATIGA